



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN | 20 KINERJA | 21



INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONAL

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
BERSITU
objektif, integritas, sinergi, inovatif | tanggung jawab



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (Lakin) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun kedua dalam periode Rencana Strategi (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang mengemban tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu unsur pelaksana BPK RI berkewajiban pula menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berkala sesuai dengan target yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dengan unit eselon I BPK RI.

Sesuai dengan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan sasaran strategis BPK RI yang merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Atas Sasaran strategis tersebut, BPK telah merumuskan dua arah kebijakan dan enam strategi yang diturunkan kepada unit eselon I serta unit eselon II yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan dua sasaran yang dibagi atas 13 Indikator Kinerja. Indikator Kinerja ini meliputi tugas dan fungsi unit eselon II sebagai perwakilan BPK RI di daerah, diantaranya: Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Hasil Evaluasi AKIP, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dan Tingkat Kinerja Anggaran.

Kami berharap Lakin BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ini dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Gowa, 28 Januari 2022

Kepala Perwakilan,



Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
NIP 196911131991031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	3
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.....	5
E. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	11
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi.....	19
IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	20
IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	21
IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	24
IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	26
IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	28
IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	29
IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	30
IK 8 Hasil Evaluasi AKIP	32
IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	33
IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	34
IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	37
IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.....	38
IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran	39
Realisasi Pencapaian IK Tahun Berjalan dengan Target Akhir Periode Renstra	40
B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
1. Capaian Realisasi Pemanfaatan Anggaran dan Capaian Realisasi Keluaran/ <i>Output</i>	41
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	42
C. Penjabaran Capaian Indikator Kinerja Keluaran Organisasi	43

IKK 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.....	44
IKK 2 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	45
IKK 3 Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	46
IKK 4 Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	47
IKK 5 Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	47
IKK 6 Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	48
IKK 7 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	48
IKK 8 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	49
IKK 9 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan.....	50
IKK 10 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	51
IKK 11 Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	51
IKK 12 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	52
IKK 13 Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	52
IKK 14 Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	52
IKK 15 Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan.....	53
IKK 16 Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	53
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021	7
Tabel II.1	Indikator Kinerja (IK) dan Target Kinerja Tahun 2021	16
Tabel II.2	Indikator Kinerja Keluaran (IKK) dan Target Tahun 2021	17
Tabel III.1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	19
Tabel III.2	Perkembangan Capaian IK 1 Tahun 2019-2021	21
Tabel III.3	Matriks Harapan Penugasan, P2 dan LHP Terbit.....	22
Tabel III.4	Perkembangan Capaian IK 2 Tahun 2019-2021	23
Tabel III.5	Pergerakan Capaian IK 4 Tahun 2019-2021.....	28
Tabel III.6	Pergerakan Capaian IK 5 Tahun 2019-2021.....	28
Tabel III.7	Pergerakan Capaian IK 6 Tahun 2019-2021.....	30
Tabel III.8	Perkembangan Capaian IK 7 Tahun 2019-2021	31
Tabel III.9	Perkembangan Capaian IK 8 Tahun 2019-2021	33
Tabel III.10	Perkembangan Capaian IK 9 Tahun 2019-2021	34
Tabel III.11	Perkembangan Capaian IK 10 Tahun 2019-2021.....	36
Tabel III.12	Perkembangan Capaian IK 11 Tahun 2019-2021.....	37
Tabel III.13	Perkembangan Capaian IK 12 Tahun 2019-2021.....	39
Tabel III.14	Perkembangan Capaian IK 13 Tahun 2019-2021.....	40
Tabel III.15	Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Keluaran Tahun 2021	42
Tabel III.16	Target dan Capaian Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2021	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	4
Gambar I.2	Grafik Jumlah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	6
Gambar I.3	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar II.1	Visualisasi Renstra BPK RI.....	11
Gambar II.2	Visualisasi Renstra AKN VI	12
Gambar II.3	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	12
Gambar II.4	Peta Strategis dalam Perjanjian Kinerja.....	16
Gambar III.1	Penyerahan LHP LKPD TA 2020 dan LHP Kinerja dalam Rangka LFAR pada Sidang Paripurna Pemprov. Sulawesi Barat	20
Gambar III.2	Grafik PTLRHP Sampai Triwulan IV Tahun 2021	24
Gambar III.3	Pelaksanaan PTLRHP Semester II 2021 dengan Pemda di Wilayah Sulawesi Barat...	25
Gambar III.4	Grafik Perkembangan PTLRHP Lima Tahun ke Belakang	25
Gambar III.5	Penyerahan LHP Kinerja dan LHP DTT/Kepatuhan Secara Daring pada Semester II 2021.....	27
Gambar III.6	Internalisasi Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.....	31
Gambar III.7	Pemaparan PPG dalam Rangka Penerapan Manajemen Pengetahuan	36
Gambar III.8	Sinergi dengan Instansi Vertikal Kunjungan Kerja Kepala Perwakilan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perbandingan Pencapaian Realisasi Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024
- Lampiran 2 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP LKPD, Kinerja, DTT dan Banparpol
- Lampiran 3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
- Lampiran 4 Formulir Pengukuran Kinerja
- Lampiran 5 Skor Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA
- Lampiran 6 Skor Indikator Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA



Tampak Depan Gedung BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**
- C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**
- D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**
- E. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja (Lakin). Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak hanya melekat pada BPK RI sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada lampiran II, bagian (D) yang menyatakan bahwa pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun laporan kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan satuan kerja pada BPK RI dari beberapa satuan kerja lainnya, dalam hal ini khususnya berada di bawah unit kerja eselon I Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) yang juga harus menyusun Laporan Kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penyampaian laporan kepada unit kerja, dan juga sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2021 yang merupakan periode kedua Renstra BPK Tahun 2020-2024. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sampai dengan akhir Tahun 2021 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwakilan BPK RI ke-33 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007, dan diresmikan pada tanggal 16 Desember 2008 oleh Wakil Ketua BPK RI alm. Abdullah Zainie, S.H. di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten

Mamuju Tengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitasnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

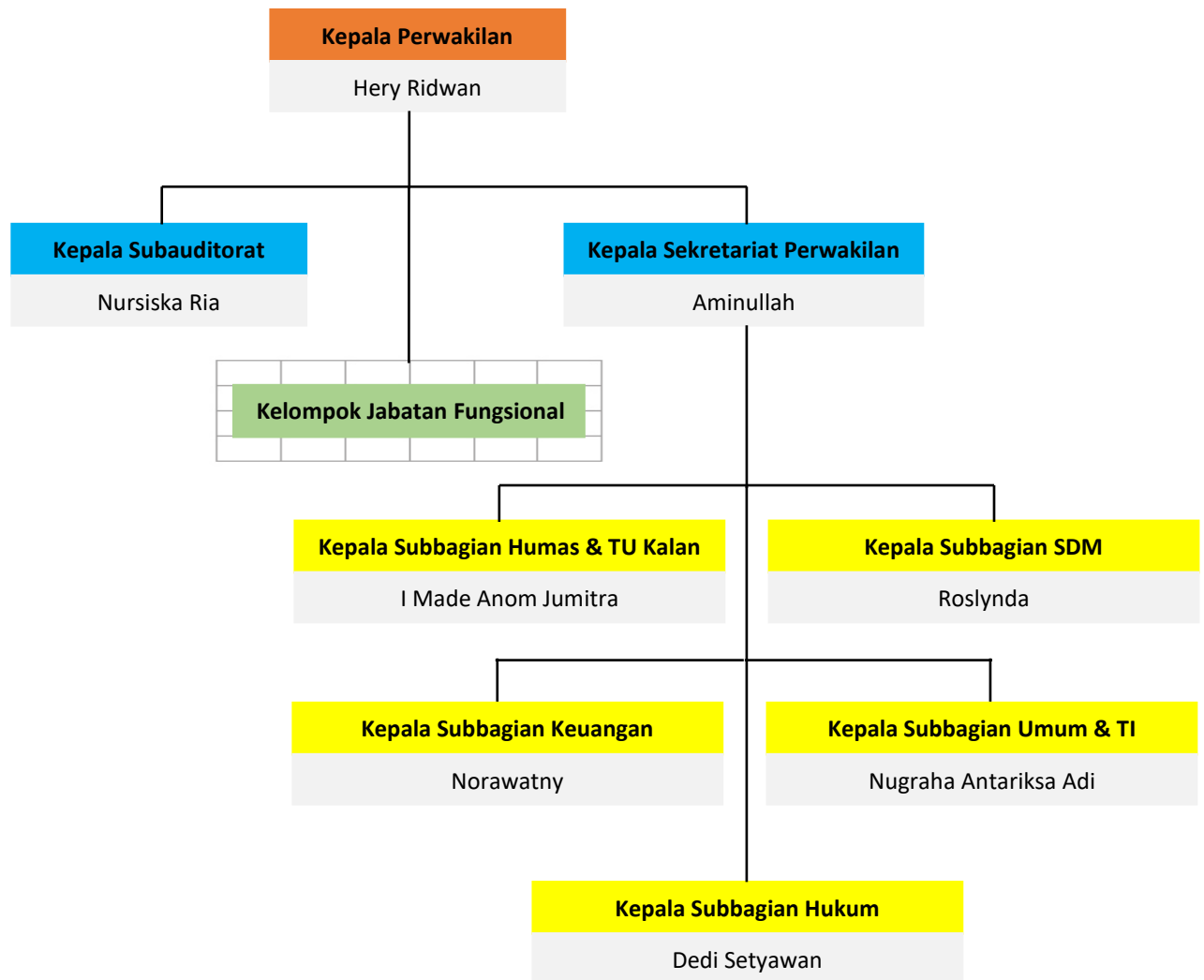
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP);
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat setelah pemberlakuan Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar I.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) dalam rangka pengukuran indikator kinerja utama unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

b) Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

c) Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

e) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

2. Subauditorat Sulawesi Barat

Subauditorat Sulawesi Barat mempunyai tugas:

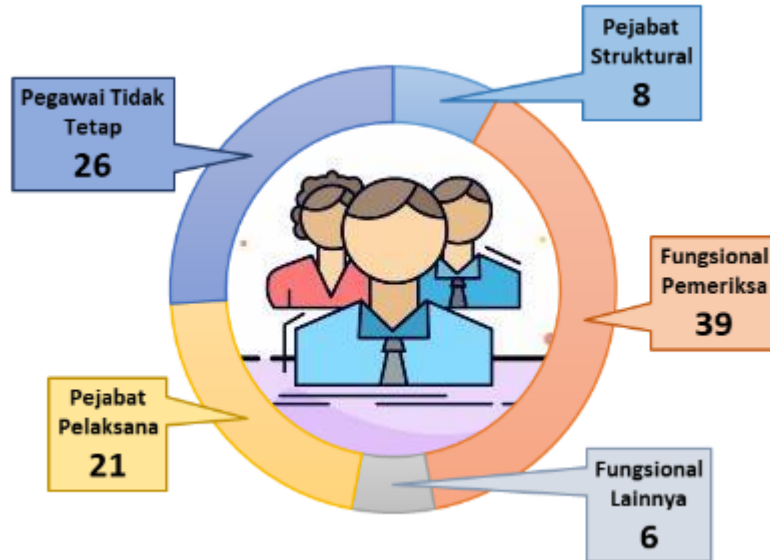
- a) Pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Sumber daya manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebanyak 100 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 74 orang

(74%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 orang (26%) Pegawai Tenaga Kontrak/Tidak Tetap, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

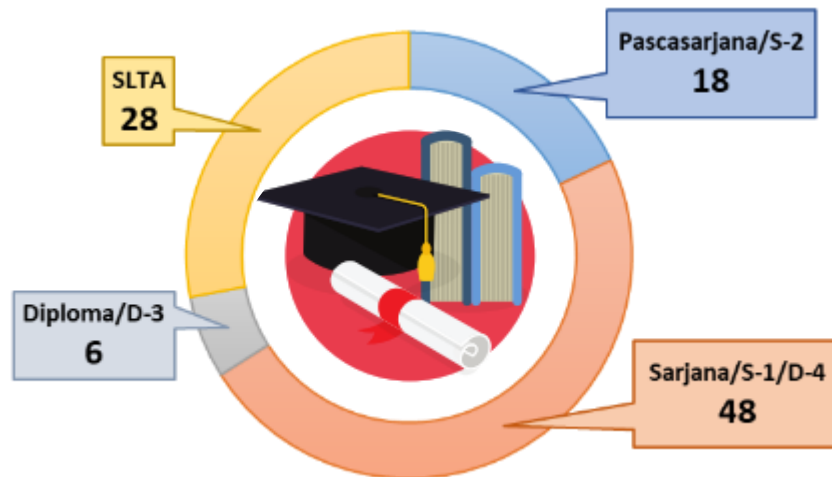


Dari gambar di atas dapat dijabarkan bahwa:

- 8 (delapan) orang PNS Pejabat Struktural terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Kepala Perwakilan;
 - 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan;
 - 1 (satu) orang Kepala Subauditorat; dan
 - 5 (lima) orang Kepala Subbagian.
- 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS Pejabat Fungsional Pemeriksa terdiri dari:
 - 16 (enam belas) orang Pemeriksa Ahli Muda; dan
 - 23 (dua puluh tiga) orang Pemeriksa Ahli Pertama.
- 6 (enam) orang PNS Pejabat Fungsional Lainnya terdiri dari:
 - 1 (satu) Analis Kepegawaian Ahli Pertama;
 - 1 (satu) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
 - 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Mahir; dan
 - 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil.
- 21 (dua puluh satu) orang PNS Pejabat Pelaksana yang ditempatkan di setiap subbagian pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- 26 (dua puluh enam) orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Berdasarkan tingkat pendidikan seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Untuk mencapai sasaran kegiatan Tahun 2021 yaitu meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan alokasi anggaran sebagai sumber daya keuangan untuk tahun 2021 senilai Rp15.807.010.000,00. Sasaran dari alokasi anggaran tersebut adalah untuk meningkatkan pemeriksaan berkualitas dengan alokasi senilai Rp6.350.782.000,00 dan untuk meningkatkan layanan pemeriksaan dengan alokasi senilai Rp9.456.228.000,00. Uraian alokasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan di BPK Perwakilan Sulawesi Barat dengan target *output* yang diharapkan dikeluarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran dan Rincian <i>Output</i>	Pagu Anggaran (Rp)	Target Keluaran/ <i>Output</i>	
		Qty	Satuan/Volume
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6.350.782.000,00		
a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	2.892.854.000,00	17	LHP
b. LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Banparpol)	104.796.000,00	75	LHP
c. Bahan Perumusan Pendapat	12.076.000,00	1	Rumusan Bahan Pendapat
d. Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Perwakilan	85.375.000,00	2	Sumbangan IHPS
e. Laporan Profil Entitas	18.686.000,00	14	Laporan
f. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	68.975.000,00	14	Laporan
g. Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	326.739.000,00	14	Laporan
h. LHP Interim/Pendahuluan	2.248.906.000,00	15	LHP Pendahuluan
i. Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	592.375.000,00	12	Laporan
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	9.456.228.000,00		
a. Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.606.539.000,00	20	Laporan
b. Layanan Sarana Internal	363.139.000,00	2	Paket
c. Layanan Prasarana Internal	119.006.000,00	1	Paket
d. Layanan Perkantoran	7.367.544.000,00	1	Layanan
Total Anggaran dan Realisasi (1 + 2)	15.807.010.000,00		

E. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para entitas pemeriksaan perlu ditingkatkan
Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Sulawesi Barat merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Barat dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Sulawesi Barat juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan akhir tahun 2021 pencapaian persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 75,26%. Meskipun rata-rata tingkat penyelesaian tindak lanjut cukup tinggi, namun disadari bahwa masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang penyelesaiannya berlarut-larut oleh entitas pemeriksaan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian dari pemangku kepentingan karena masih dinilai sebagai indikasi lemahnya pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK
Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Selama ini terdapat pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap opini yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat memahami bahwa opini WTP merupakan indikasi bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Harapan dan pemahaman dari pemangku kepentingan tersebut perlu untuk ditanggapi melalui edukasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan tugas BPK khususnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam pemeriksaan keuangan daerah. Upaya yang akan terus dilakukan adalah melalui kegiatan Media Relation sebagai sarana edukasi dan sosialisasi dengan melibatkan awak media, baik media cetak, siber dan media elektronik.
3. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan
LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai Lembaga Negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta meminimalisir kesalahan di LHP demi menjaga marwah dan kredibilitas BPK. Upaya yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Barat adalah meningkatkan pelaksanaan cross review antar tim pemeriksaan dan direviu berjenjang dalam mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan. Kredibilitas organisasi juga dilakukan melalui proses internalisasi nilai-nilai dasar BPK ke dalam karakter individu pegawai melalui upaya berkesinambungan dalam bentuk kegiatan formal dan informal.
4. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM di BPK
Kondisi pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat saat ini belum memadai, baik dari sisi jumlahnya maupun kesesuaian kompetensi dalam bidang yang dikerjakan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat masih kekurangan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang/pendukung. Kesesuaian jumlah pemeriksa dan tenaga penunjang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat agar dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Kesesuaian peran JFP dalam pemeriksaan akan menjamin hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, kecukupan tenaga penunjang juga penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

5. Peningkatan pemanfaatan aplikasi sistem informasi dan perangkat sistem *e-audit*
Dalam periode Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan mendorong pegawai untuk mengembangkan aplikasi system informasi pendukung di lingkup perwakilan yang dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan penunjang/pendukung. Dengan demikian melalui pemanfaatan sistem informasi dan database yang lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.
6. Meningkatkan kinerja implementasi anggaran
Menyadari bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan menggunakan sumber daya keuangan negara, oleh karena itu pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung keuangan negara termasuk kegiatan-kegiatan penunjang.



*Pasca Gempa Bumi di Mamuju, Auditor
Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI)
mengunjungi Kantor Sementara BPK
Perwakilan Sulbar di Gowa*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020-2024**
- B. Perjanjian Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi
Barat**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk periode lima tahunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

A. Rencana Strategis 2020-2024

BPK RI telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Atas hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menyusun Renstra Perwakilan Tahun 2020-2024 sebagai turunan untuk mendukung tercapainya Renstra BPK Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Renstra BPK RI. Dalam Renstra BPK RI Tahun 2020-2024, BPK telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang divisualisasikan sebagai berikut:

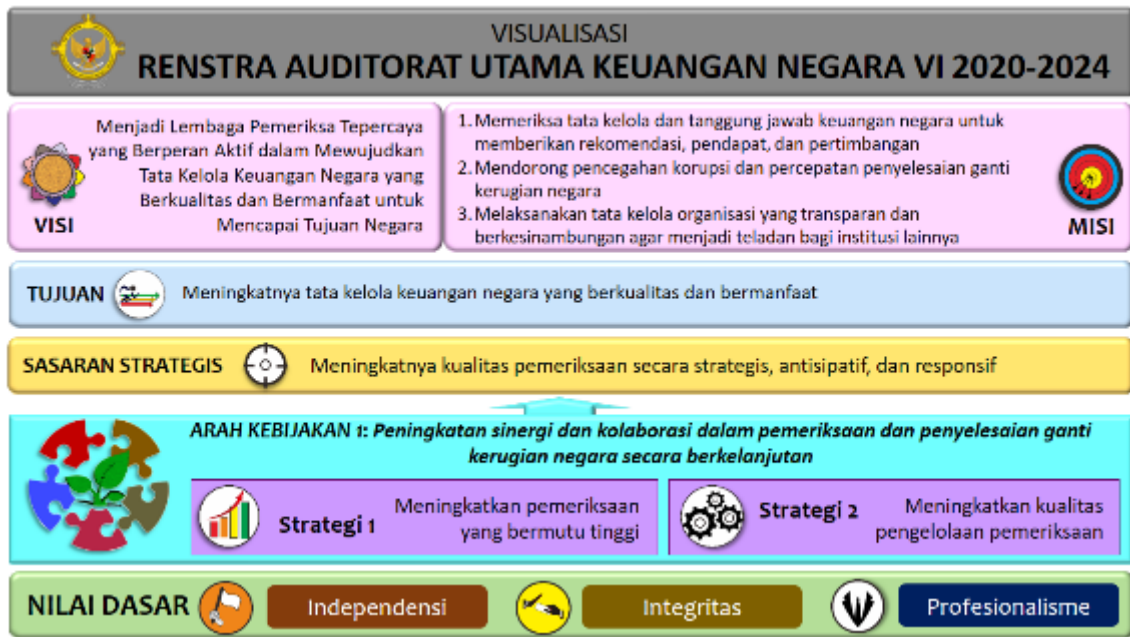
Gambar II.1 Visualisasi Renstra BPK RI



Pencapaian atas sasaran strategis BPK tersebut merupakan tanggung jawab Badan yang dibantu pelaksana tugas BPK. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Dalam visualisasi Renstra di atas, BPK telah menetapkan dua arah kebijakan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut terdapat enam strategi yang akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas unit eselon I BPK. Pelaksana tugas BPK tingkat eselon I bidang teknis pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara I-VII dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pelaksana BPK yang di bawah langsung AKN VI, juga mendukung strategi AKN VI dalam mendukung Arah Kebijakan Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Dalam visualisasi renstra, AKN VI akan menjalankan Strategi BPK untuk Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. AKN VI mengoperasionalkan arah kebijakan dan strategi BPK tersebut ke dalam strategi AKN VI, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar II.2 Visualisasi Renstra AKN VI



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis untuk menunjang tercapainya strategi 2 BPK RI, serta mendukung strategi AKN VI tersebut. Atas hal itu, untuk merealisasikannya maka BPK Perwakilan Sulawesi Barat telah membuat Renstra Perwakilan untuk periode 2020-2024 dengan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran sebagaimana dapat dilihat dalam visualisasi berikut:

Gambar II.3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



Untuk mendukung tujuan BPK sebagaimana yang telah divisualisasikan pada gambar II.1, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan dalam renstra perwakilan yaitu "Meningkatnya Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat". BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bertekad untuk berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang menjadi mandat dalam merespon isu yang menjadi prioritas atau perhatian publik dan

mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara/daerah serta melakukan penghitungan kerugian negara/daerah.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perwakilan adalah "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi". Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Sulawesi Barat ingin memastikan bahwa Pemeriksaan yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas sehingga hasil pemeriksaan dapat memiliki manfaat bagi perbaikan entitas pemeriksaan. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Barat turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, akan dicapai melalui pelaksanaan yang tujuan akhirnya akan bermuara pada terwujudnya dua sasaran yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas

Pencapaian sasaran kegiatan ini dilakukan melalui berbagai macam aktivitas yang antara lain menghasilkan rincian *output* sebagai berikut: LHP, LHP Interim/Pendahuluan, LHP Banparpol, Laporan Pemantauan TLHP, Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Bahan Perumusan Pendapat, Sumbangan IHPS, Laporan Profil Entitas, Laporan Manajemen Pemeriksaan, dan Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan. Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT maupun pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal;
- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik yang terdapat pada 7 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) BPK RI;
- d. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan;
- f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SIPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini;
- g. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara; dan
- h. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.

Pada akhir periode Renstra 2020-2024 kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Entitas melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- b. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- c. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
- d. Meningkatnya kualitas LHP dengan hasil penilaian *zero error*; dan
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Sulawesi Barat dalam melaksanakan pemeriksaan, diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Pencapaian sasaran kegiatan ini dilakukan melalui berbagai macam aktivitas yang menghasilkan rincian *output* sebagai berikut: Layanan Manajemen Internal Perwakilan, Layanan Prasarana Internal, Layanan Sarana Internal, dan Layanan Perkantoran. Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan layanan perkantoran;
- b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja;
- c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang; dan
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Barat berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan teknologi informasi (TI);

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Terwujudnya jumlah SDM BPK Perwakilan Sulawesi Barat yang sesuai dengan kebutuhan beban tugas baik pada pemeriksa maupun penunjang;
- b. Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis TI dan Komunikasi pada era new normal; dan
- c. Terwujudnya BPK Perwakilan Sulawesi Barat yang dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsi BPK Perwakilan Sulawesi Barat.

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi
Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- b. Integritas
Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- c. Profesionalisme
Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

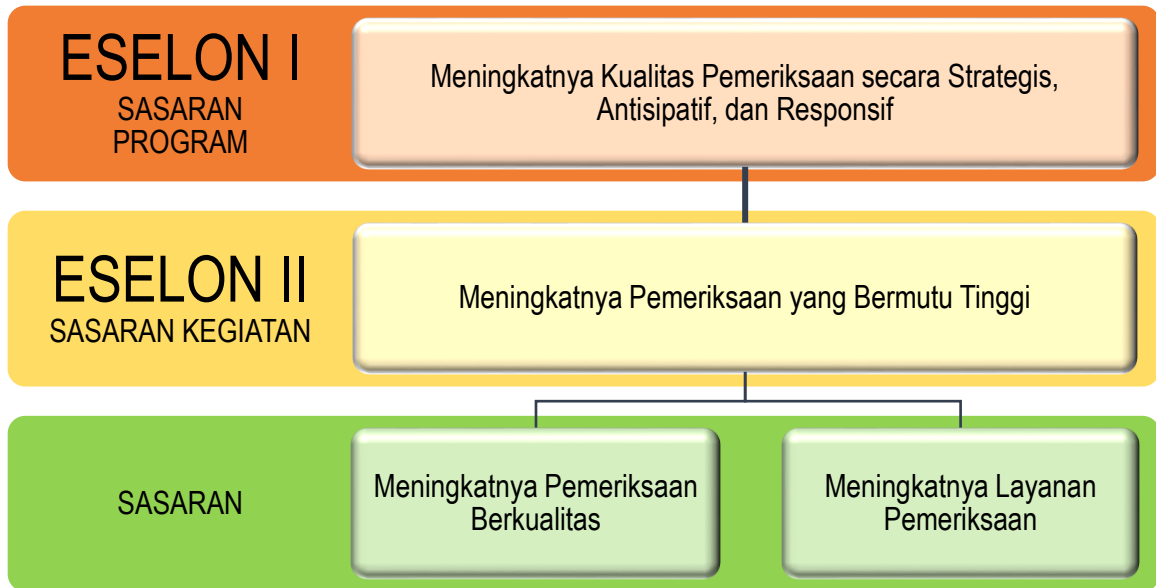
Untuk mendukung nilai-nilai dasar BPK, secara internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengembangkan Budaya kerja dengan jargon **Bersatu** yaitu:

- a. Objektif
Bersikap objektif mengandung arti BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bebas dari pengaruh, tekanan, mampu melihat dan menilai secara objektif, serta bebas dari segala kepentingan dalam melakukan pemeriksaan, dan tidak memiliki hubungan langsung/istimewa dengan auditee yang dianggap dapat mempengaruhi proses/hasil audit. Dengan demikian BPK dapat menjunjung nilai dasar Independensi.
- b. Integritas
Sikap Integritas sebagai salah satu nilai dasar BPK yang mencerminkan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku, bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- c. Sinergi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa bersinergi baik secara internal antar pegawai maupun secara eksternal dengan para *stakeholder* demi tercapainya pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
- d. Inovasi
Secara professional insan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi dan terus menghasilkan ide-ide pembaharuan yang mengikuti perkembangan zaman guna menunjang pekerjaan.
- e. Tanggung Jawab
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab untuk terus mengembangkan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPK serta mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. Perjanjian Kinerja pada level Eselon II merupakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja satuan kerja eselon II untuk mendukung pencapaian target kinerja unit kerja Eselon I dengan ukuran berupa Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) yang harus dipenuhi pada Tahun 2021. Dari hal tersebut ditetapkan dan telah di tandatangani oleh pimpinan BPK RI bahwa, pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengemban 13 IK dan 16 IKK. Target pencapaian IK dan IKK Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

Gambar II.4 Peta Strategis dalam Perjanjian Kinerja



Tabel II.1 Indikator Kinerja (IK) dan Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp15.807.010.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp6.350.782.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp9.456.228.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	

Tabel II.2 Indikator Kinerja Keluaran (IKK) dan Target Tahun 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	3	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS Perwakilan	4	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	5	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	6	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	7	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
		LHP Interim/ Pendahuluan	8	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	9	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
		Layanan Sarana Internal	11	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
			12	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-
			13	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
		Layanan Prasarana Internal	14	Luas Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
		Layanan Perkantoran	15	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
			16	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%



Sambutan dan pengarahan Kepala Perwakilan BPK Sulbar, dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi**
- B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- C. Penjabaran Capaian Indikator Kinerja Keluaran Organisasi**

Capaian kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) di *input* dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dan menghasilkan nilai atau skor kinerja. Dalam pelaksanaannya, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) meliputi proses penginputan, validasi, dan revidi data input. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola kinerja Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan pengelola kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan diantaranya:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self-assessment* dimana data realisasi kinerja di-*input* oleh masing-masing satuan kerja ke dalam aplikasi PRISMA;
2. Capaian indikator dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:
 - **Skor ≥ 100**
 - **80 ≥ Skor > 100**
 - **Skor < 80**
3. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator; dan
4. Validasi data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi

Pencapaian skor kinerja utama atas sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" adalah sebesar 99,49. Sehingga seluruh Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan hasil penggabungan penilaian pencapaian realisasi dengan target dari 13 Indikator Kinerja. Rincian target, capaian, dan skor kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil data IK yang telah tercantum pada aplikasi PRISMA adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

IK No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Skor IK	Skor Kinerja
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					99,49 ●
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90%	90 ●	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100 ●	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,26%	100,34 ●	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,51%	100,51 ●	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100 ●	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,36%	100,36 ●	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,48)	89,6 ●	
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (93,41)	105 ●	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,59%	102,7 ●	

IK No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Skor IK	Skor Kinerja
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100 ●	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,11)	105 ●	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,55%	98,55 ●	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	86,69%	99,07 ●	

Penjelasan atas capaian masing-masing Indikator Kinerja (IK) pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

IK 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan pengukuran atas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu *Quality Control* (QC) pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) secara berjenjang. Pemeriksaan yang dilaksanakan dalam hal ini meliputi tahap perencanaan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap pelaporan hasil pemeriksaan. PFP dan PSP dalam hal ini adalah para Ketua Tim (KT), Pengendali Teknis (PT), Wakil Penanggung Jawab (selaku PSP dengan jabatan Kepala Subauditorat), dan oleh Penanggung Jawab (selaku PSP dengan jabatan Kepala Perwakilan) pemeriksaan. Pengendalian mutu yang dilakukan



IK 1 - Bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan

tidak hanya terbatas melalui observasi langsung ke lapangan, namun juga melalui laporan progress mingguan yang wajib mendapat *feedback* dari masing-masing jenjang peran dalam tim pemeriksaan. Selain itu reviu dan evaluasi juga dilakukan oleh pihak eksternal dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Direktorat EPP, dan Itama BPK RI.

Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 90% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pada semester I Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tujuh entitas. Bersamaan dengan pemeriksaan LKPD, BPK berupaya memberikan nilai tambah untuk *stakeholder*, hal ini sesuai dengan *International Standar of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) 12. Dari hal tersebut memunculkan inisiasi sebuah *Long Form Audit Report* (LFAR), dimana BPK Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan kinerja infrastruktur pada Pemprov. Sulawesi Barat yang pelaksanaan pemeriksaan dan penyerahan LHP nya berbarengan dengan pemeriksaan dan penyerahan LHP LKPD pada Pemprov. Sulawesi Barat.

Gambar III.1 Penyerahan LHP LKPD TA 2020 dan LHP Kinerja dalam Rangka LFAR pada Sidang Paripurna Pemprov. Sulawesi Barat



Sedangkan pada semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan enam LHP Kinerja dan tiga LHP PDDT/Kepatuhan. Sebelum dilakukan finalisasi atas LHP, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pengendalian pemerolehan keyakinan mutu mulai dari tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dituangkan dalam dokumentasi QC oleh PFP secara berjenjang mulai dari KT, PT, Pengendali Mutu (PM) dan QA oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) yaitu Kepala Subauditorat serta Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP) yaitu Kepala Perwakilan. LHP yang telah diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah melalui rangkaian evaluasi oleh Direktorat EPP serta direviu oleh Inspektorat Utama (Itama) BPK RI.

Capaian tersebut diukur berdasarkan tiga variabel, yaitu persentase hasil pemenuhan QA dan QC yang bersumber dari lembar *checklist* QA dan QC dengan pencapaian 100%. Pembobotan untuk QA dan QC sebesar 40%, sehingga mendapatkan hasil akhir 40%. Variabel kedua yaitu hasil evaluasi Direktorat EPP dengan pencapaian tingkat konsistensi *output* LHP sebesar 50% dan tingkat akurasi *output* LHP sebesar 100%. Pembobotan tingkat akurasi sebesar 60% dan tingkat konsistensi sebesar 40% sehingga total pencapaian evaluasi dari Direktorat EPP adalah 80%. Pembobotan untuk hasil akhir evaluasi Direktorat EPP adalah sebesar 50%, sehingga mendapatkan hasil akhir 40%. Variabel ketiga yaitu hasil reviu Itama (*individual score*) dengan pencapaian 100%. Pembobotan untuk variabel ini sebesar 10%, sehingga mendapatkan hasil akhir 10%. Sehingga realisasi hasil total akhir indikator ini adalah 90% (40% + 40% + 10%). Adapun perkembangan capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2 Perkembangan Capaian IK 1 Tahun 2019-2021

IK 1	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	100%	100%
Realisasi	NA	82,14%	90%
Capaian	NA	82,14	90
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	NA	+7,86%

Ketidaktercapainya indikator ini pada tahun 2021 disebabkan masih terdapat beberapa catatan dan koreksi dari Direktorat EPP yang perlu diperbaiki terkait tingkat konsistensi pada empat *output* LHP LKPD TA 2020. Atas hal itu pada tahun berikutnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan berupaya serta berkomitmen untuk terus berkoordinasi internal dengan tim pemeriksa agar lebih memperhatikan serta memperbaiki setiap catatan dan koreksi dari Direktorat EPP terkait tingkat konsistensi ataupun tingkat akurasi LHP, guna menghasilkan *output* LHP yang lebih berkualitas kedepannya. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan QA dan QC atas hasil pemeriksaan, akan lebih di fokuskan pada catatan dari Direktorat EPP sebagai bahan referensi penilaian dalam proses QA dan QC. Meskipun target IK tahun 2021 tidak tercapai, jika dilihat pergerakan capaian IK ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan langkah nyata berupa koordinasi dengan tim pemeriksa untuk mempelajari catatan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan dari Direktorat EPP pada periode sebelumnya agar *output* LHP semakin baik kualitasnya.

IK 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan harapan

penugasan dari Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP). Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan, BPK melakukan perencanaan pemeriksaan yang merupakan proses awal dari pelaksanaan pemeriksaan. Tentunya setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan serta risiko manajemen pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, serta standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, sehingga bisa meningkatkan kualitas LHP. Salah satu *output* dalam perencanaan pemeriksaan ini adalah Program Pemeriksaan (P2). Dalam menyusun P2, PFP harus memastikan bahwa materi konsep P2 telah memenuhi tujuan serta harapan penugasan dari PTP. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun P2 dan harapan penugasan sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. Selama tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan Harapan Penugasan, P2 dan LHP yang digambarkan pada tabel berikut ini:



IK 2 - Bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat agar meningkatkan kualitas LHP

Tabel III.3 Matriks Harapan Penugasan, P2 dan LHP Terbit

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Harapan Penugasan	Jumlah P2 yang Disusun	Jumlah LHP yang Terbit	LHP Terbit pada Bulan
1	LHP LKPD Tahun Anggaran (TA) 2020 pada tujuh Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten).	7	7	7	Mei 2021
2	LHP Kinerja atas: a. Program Peningkatan Infrastruktur pada Pemprov. Sulawesi Barat TA 2020; *) b. Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat, Pemkab. Mamuju, dan Pemkab. Polewali Mandar; c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya; d. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemkab. Mamuju Tengah; e. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Polewali Mandar.	5	5	7	*)Mei 2021 Desember 2021
3	LHP PDDT/Kepatuhan atas: a. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Sulawesi Barat, KPUD Kab.	2	2	3	Desember 2021

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Harapan Penugasan	Jumlah P2 yang Disusun	Jumlah LHP yang Terbit	LHP Terbit pada Bulan
	Mamuju, KPUD Kab. Majene, KPUD Kab. Pasangkayu, dan KPUD Kab. Mamuju Tengah TA 2020 dan 2021; dan b. Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya.				
Jumlah Output LHP dan P2		14	14	17	

Catatan: Matriks pada tabel belum termasuk pemeriksaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah kepada Partai Politik (Banparpol).

Seluruh kesesuaian simpulan LHP dengan harapan penugasan yang digambarkan pada tabel di atas telah diverifikasi oleh Direktorat EPP. Berdasarkan hasil penilaian Direktorat EPP atas indikator ini sampai dengan akhir tahun 2021 BPK Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan skor 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Atas hal tersebut indikator kinerja ini tercapai, dan LHP yang terbit pada tahun 2021 seluruhnya telah sesuai dengan harapan penugasan. Pencapaian indikator ini dikarenakan para pemeriksa telah dibekali arahan harapan penugasan dari Kepala Perwakilan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pelaksanaan diklat pemeriksaan LKPD. Selain itu dalam proses pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan LHP, dilakukan reviu secara berjenjang oleh PFP, dilaksanakannya QA dan QC dengan memperhatikan aspek kesesuaian antara harapan penugasan, P2, dengan *output* pemeriksaan yaitu LHP.

Capaian tersebut diukur dengan formula perhitungan dari perbandingan antara persentase dua variabel, yaitu (1) jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dengan, (2) jumlah LHP yang diterbitkan. Perkembangan capaian ini juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4 Perkembangan Capaian IK 2 Tahun 2019-2021

IK 2	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	100%	100%
Realisasi	NA	100%	100%
Capaian	NA	100	100
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	NA	-

Berdasarkan tabel di atas, pergerakan IK ini stabil dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal tersebut karena BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat konsisten dan fokus bahwa harapan penugasan merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun capaian ini telah terpenuhi pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen pada saat pelaksanaan perencanaan pemeriksaan, para pemeriksa akan selalu diberikan arahan secara umum oleh Kepala Perwakilan, tentang harapan penugasan, larangan-larangan yang harus dihindari pada saat pelaksanaan pemeriksaan, dan hal-hal penting yang harus dilakukan pemeriksa sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan. Selain itu para pemeriksa juga akan terus dibekali dengan diklat sebelum dilaksanakannya pemeriksaan, yang dimana pada diklat tersebut dijelaskan arah kebijakan pemeriksaan khususnya di lingkungan AKN VI dimana BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bernaung. Sehingga harapannya, simpulan atas LHP yang terbit akan sesuai dengan harapan penugasan pada tahun-tahun berikutnya.

IK 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Pada indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong perbaikan pada kegiatan strategis maupun operasional yang mendorong kinerja *auditee*.

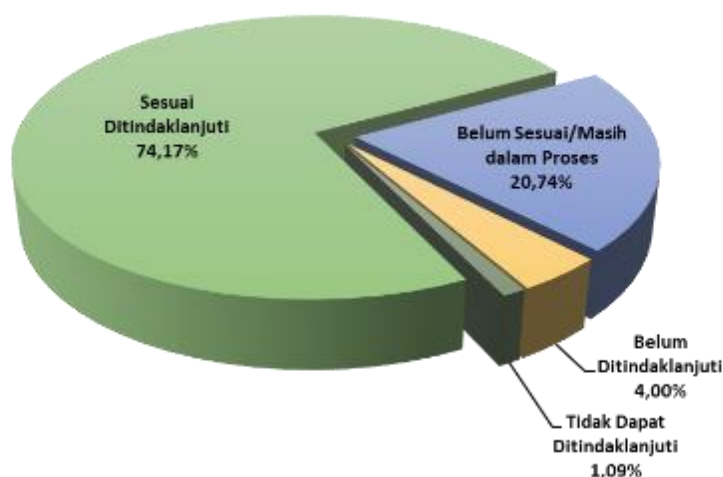


IK 3 - Bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Hingga akhir tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan sebanyak 6.272 rekomendasi kepada *auditee*. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 4.652 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti oleh *auditee*, 1.301 rekomendasi belum sesuai/masih dalam proses ditindaklanjuti oleh *auditee*, 251 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh *auditee*, dan

68 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah oleh *auditee*. Sumber data yang tersaji atas rekomendasi tersebut, diambil berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut yang telah masuk pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Untuk penilaian indikator ini data yang dimasukkan dalam Lakin adalah data yang bersumber dari hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) BPK *Wide* yang termuat hingga triwulan IV tahun 2021. Sampai saat disusunnya laporan kinerja ini. Secara rinci persentase untuk masing-masing status penyelesaian rekomendasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada grafik sebagai berikut:

Gambar III.2 Grafik PTLRHP Sampai Triwulan IV Tahun 2021



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa IK 3 mencapai 75,26%, hal ini diukur dengan menjumlahkan rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti sebesar 74,17% dengan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah yaitu sebesar 1,09%. Untuk tahun 2021 target yang ditetapkan atas IK ini sebesar 75%, sehingga dapat disimpulkan capaian IK 3 terpenuhi

di tahun 2021. Pencapaian indikator ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan tindakan nyata untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh *auditee*, diantaranya dengan:

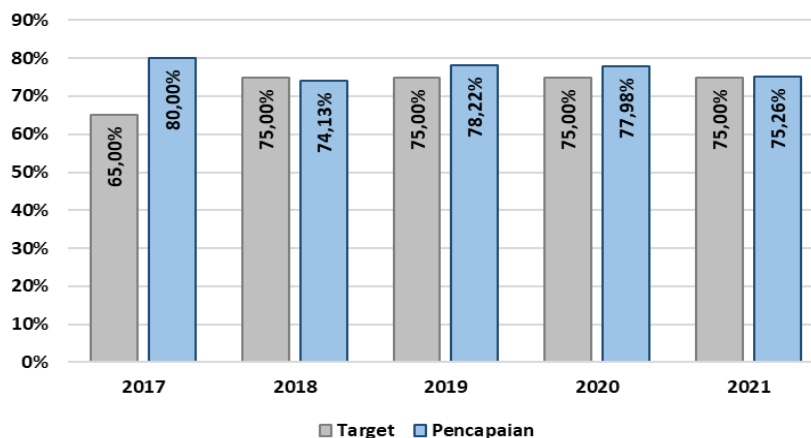
- Berkoordinasi dengan entitas untuk membahas rencana aksi (*action plan*) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- Mendorong dan memonitoring secara berkala atas pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh *auditee*;
- Terus mengingatkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar III.3 Pelaksanaan PTLRHP Semester II 2021 dengan Pemda di Wilayah Sulawesi Barat



Untuk pergerakan persentase penyelesaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (PTLRHP) selama 5 tahun ke belakang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar III.4 Grafik Perkembangan PTLRHP Lima Tahun ke Belakang



Jika melihat tren grafik lima tahun ke belakang pencapaian tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perbandingan untuk penilaian tahun 2020 menggunakan data PTLRHP triwulan III tahun 2020, sedangkan tahun 2021 sudah menggunakan data *real time* triwulan IV tahun 2021. Dimana data PTLRHP triwulan IV tahun 2021 telah mengakomodir rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat hingga pemeriksaan Kinerja dan PDTT semester II tahun 2021. Rekomendasi-rekomendasi

atas hasil pemeriksaan semester II tahun 2021 diberikan waktu untuk ditindaklanjuti oleh entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 60 hari setelah LHP diterima. Langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun-tahun berikutnya adalah melakukan PTLRHP secara *real time* mingguan dan/atau bulanan. Hal ini dilakukan guna melaksanakan Instruksi Dinas dari Tortama KN VI nomor 03/ID/XIX/11/2021 tentang Kebijakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Lingkungan AKN VI.

Formula dari capaian indikator ini adalah persentase atas perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan jumlah seluruh rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*.

IK 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Dalam perkembangannya di tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merencanakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis dan isu dalam RPJMN. Kegiatan pemeriksaan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP), dan pelaksanaannya dilakukan pada semester II tahun 2021 yaitu:



IK 4 - Bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

- a. Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih belum mereda, atas hal tersebut pemerintah melakukan kebijakan percepatan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai langkah pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia serta menciptakan kekebalan komunal. Atas hal tersebut BPK merespon kebijakan pemerintah, dan ikut mengawasi serta menilai efektivitas kinerja atas upaya pengelolaan vaksinasi dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam kegiatan pemeriksaan tersebut dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi pada Pemprov. Sulawesi Barat, Pemkab. Mamuju, dan Pemkab. Polewali Mandar.
- b. Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN pemerintah adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (prioritas nasional ke-3). Untuk menciptakan SDM yang berkualitas salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui kebijakan transformasi *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata sebagai modal pembangunan SDM berkualitas. Di Indonesia tingkat pengangguran masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah (SMA 26,51% dan SMK 22,43%). Berdasarkan isu tersebut BPK bergerak untuk melakukan pemeriksaan Kinerja atas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama dunia usaha dan dunia industri dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing secara serentak di pusat dan perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan tersebut khususnya pada Pemprov. Sulawesi Barat dan instansi terkait lainnya.

- c. Dampak dari pandemi Covid-19 masih terasa pada tahun 2021 di Indonesia. Dampak yang dialami mulai dari kesehatan maupun perekonomian masyarakat. Dampak tersebut mengakibatkan pengangguran dan PHK, kemiskinan, hingga kematian. Atas hal tersebut pemerintah melakukan langkah-langkah menangani permasalahan tersebut diantaranya dengan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Untuk merespon isu tersebut BPK melakukan pemeriksaan untuk menjamin kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari *Audit Universe* dalam kerangka pemeriksaan yang komprehensif atas penanganan Covid-19. Di lingkup entitas wilayah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Pemkab. Mamasa memiliki wilayah desa terbanyak yaitu sebanyak 168 desa. Sehingga fokus pemeriksaan ini pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah pada Pemkab. Mamasa.

Hingga periode akhir semester II berakhir, seluruh pemeriksaan tematik nasional tersebut telah diselesaikan, dan penyerahan LHP telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021.

Gambar III.5 Penyerahan LHP Kinerja dan LHP DTT/Kepatuhan Secara Daring pada Semester II 2021



Capaian atas indikator ini adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan kata lain target telah terpenuhi. Perhitungan capaian ini diukur berdasarkan tiga variabel, yaitu persentase jumlah realisasi pemeriksaan tematik nasional sebanyak tiga (3) kegiatan pemeriksaan, dibagikan dengan jumlah rencana pemeriksaan dalam RKP yang disusun sebanyak tiga (3) obrik pemeriksaan tematik nasional, sehingga menghasilkan skor 100%. Selain itu terdapat penambahan atas variabel alokasi skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Perhitungan alokasi penambahan skor tersebut dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satuan kerja pada setiap pemeriksaan tematik nasional. Berdasarkan surat tugas pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, kontribusi jumlah pegawai dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas terlaksananya pemeriksaan tematik nasional ini mencapai 27 pegawai. Dari kontribusi jumlah pegawai tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan alokasi skor tambahan oleh Direktorat PSMK sebesar 0,51%, sehingga hasil akhir skor menjadi 100,51% (100% + 0,51%). Perkembangan capaian IK ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.5 Pergerakan Capaian IK 4 Tahun 2019-2021

IK 4	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	100%	100%
Realisasi	NA	100,75%	100,51%
Capaian	NA	100,75	100,51
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	NA	-0,24%

Ketercapaian indikator ini pada tahun 2021 dikarenakan perencanaan pemeriksaan tematik nasional telah dipersiapkan dengan matang oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi SDM maupun sumber daya keuangannya. Selain itu sebelum dilakukan pemeriksaan tematik ini, pegawai telah dibekali dengan *workshop* pemeriksaan terkait dari satuan kerja koordinator pelaksana pemeriksaan tematik nasional (AKN terkait). Sehingga pemeriksaan tematik nasional dapat diselesaikan sesuai dengan RKP yang telah ditetapkan. Pencapaian yang melebihi target ini membuktikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang tertuang pada isu strategis maupun isu pada RPJMN dan tema SDG's agar program berjalan efektif dan tepat sasaran dengan tetap menjaga akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian jika melihat tabel III.5 didapatkan bahwa tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan tahun 2020 tidak terdapat pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal, sehingga seluruh pemeriksa diterjunkan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal sehingga jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan tematik nasional pada tahun 2021 telah terbagi dengan pegawai yang melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Untuk tahun kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan merencanakan pemeriksaan tematik nasional yang mendukung BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menghasilkan perbaikan tata kelola pemerintah yang menjadi isu strategis, isu pada RPJMN maupun tema pada SDG's.

IK 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan tingkat responsif dan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan (*on call*). Permintaan pemeriksaan pemangku kepentingan yang dipenuhi adalah yang memenuhi syarat serta ditetapkan BPK dan disetujui Badan.

Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak mendapatkan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Karena tidak adanya pemeriksaan *on call* tersebut, dan berdasarkan hasil penginputan pada aplikasi PRISMA, maka capaian atas indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sehingga dapat dikatakan indikator ini tercapai pada Tahun 2021. Sementara itu untuk melihat pergerakan indikator ini pada tahun-tahun

sebelumnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel III.6 Pergerakan Capaian IK 5 Tahun 2019-2021

IK 5	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	100%	100%
Realisasi	NA	100%	100%
Capaian	NA	100	100
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	NA	-



IK 5 - Bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK

Sama dengan tahun sebelumnya, jika melihat tabel di atas tahun 2020 capaian indikator ini juga mencapai 100% yang disebabkan tidak adanya permintaan *on call* pada tahun 2020. Sehingga perkembangan IK ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan hal sama, yaitu belum adanya permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2020-2021. Hasil capaian indikator ini adalah persentase atas variabel perbandingan antara jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dengan variabel jumlah seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa ditambah dengan alokasi penambahan skor. Meskipun pada tahun 2021, BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak mendapatkan pemeriksaan *on call* dari para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat selalu siap jika kemungkinan di tahun-tahun berikutnya terdapat permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Tentunya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan berkoordinasi dengan intens kepada BPK Pusat untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh BPK untuk mendapatkan persetujuan badan, sehingga pemeriksaan *on call* bisa dilaksanakan.

IK 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Renstra BPK tahun 2020-2024 telah mengarahkan penyelarasan topik pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional yang menjadi fokus dalam RPJMN. Salah satu agenda nasional tersebut adalah pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antar daerah yang salah satu strateginya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah. Strategi terkait kemandirian daerah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan penerimaan daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, maupun item pendapatan asli daerah lainnya. Peningkatan potensi penerimaan daerah apabila dikelola dengan memadai akan mendorong kemampuan fiskal Pemda yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kualitas hidup masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian SDG's 10 yaitu mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan hal tersebut BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Pemkab. Polewali Mandar menjadi entitas terperiksa atas program tersebut pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Untuk mendukung program RPJMN dalam prioritas nasional ke-1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan prioritas nasional ke-7 yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal. BPK Perwakilan Sulawesi Barat mendukung pemeriksaan tersebut, dan merealisasikan pemeriksaan tersebut pada Pemkab. Mamuju Tengah. Kemudahan investasi merupakan amanat dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 278 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan



IK 6 - Bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta tersebut, Pemda dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. Pemeriksaan ini juga berkaitan dengan SDG's nomor 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Hingga periode akhir semester II tahun 2021 berakhir, seluruh pemeriksaan tematik lokal tersebut telah diselesaikan, dan penyerahan LHP telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021 bersamaan dengan penyerahan hasil pemeriksaan tematik nasional. Capaian atas indikator ini adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan kata lain target telah terpenuhi. Perhitungan capaian ini diukur berdasarkan tiga variabel, yaitu persentase jumlah realisasi pemeriksaan tematik lokal sebanyak dua (2) kegiatan pemeriksaan, dibagikan dengan jumlah rencana pemeriksaan dalam RKP yang disusun sebanyak dua (2) obrik pemeriksaan tematik lokal, sehingga menghasilkan skor 100%. Selain itu terdapat penambahan atas variabel alokasi skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Perhitungan alokasi penambahan skor tersebut dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satuan kerja pada setiap pemeriksaan tematik lokal. Berdasarkan surat tugas pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, kontribusi jumlah pegawai dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas terlaksananya pemeriksaan tematik lokal ini mencapai 18 pegawai. Dari kontribusi jumlah pegawai tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan alokasi skor tambahan oleh Direktorat PSMK sebesar 0,36%, sehingga hasil akhir skor menjadi 100,36% (100% + 0,36%). Perkembangan capaian IK ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.7 Pergerakan Capaian IK 6 Tahun 2019-2021

IK 6	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	100%	100%
Realisasi	NA	100%	100,36%
Capaian	NA	100	100,36
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	NA	+0,36


Jika melihat tabel di atas tahun 2020 capaian indikator ini mencapai 100%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,36%. Hal ini disebabkan tahun 2020 tidak terdapat rencana pelaksanaan tematik lokal, sedangkan pada tahun 2021 telah direncanakan dan dilaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Sehingga memberikan kontribusi kenaikan signifikansi kontribusi pegawai dalam pemeriksaan tematik lokal pada tahun 2021. Formula hasil capaian indikator ini adalah persentase atas perbandingan antara rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal, dengan jumlah realisasi pemeriksaan tematik lokal, ditambah dengan alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan.

IK 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Implementasi pegawai terhadap nilai dasar BPK adalah tindakan pegawai BPK yang terencana yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam nilai dasar BPK. Sebagaimana halnya dengan pemahaman pegawai, *key factor* dari tingkat implementasi ini juga terletak pada Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern (*leadership and internal governance*). Pengukuran atas tingkat implementasi ini merupakan satu kesatuan dengan pengukuran tingkat pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap visi, misi dan nilai-nilai dasar BPK, dan merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Untuk mendapatkan hasil atas indikator ini, telah dilakukan survei oleh pihak ke-3 yang independen dan dipilih oleh BPK RI. Hasil survei indeks implementasi nilai dasar BPK diukur dengan skala 1-5, dengan klasifikasi per masing-masing skala adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

 **IK 7 - Bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK**

Berdasarkan hasil survei, indeks implementasi nilai dasar BPK pada tahun 2021 sebesar 4,48 (sangat memuaskan), adapun target yang ingin dicapai sebesar 5,00 (sangat memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan secara angka belum terpenuhi. Hal ini disebabkan belum optimalnya internalisasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terkait pemahaman nilai dasar BPK kepada seluruh pegawai. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah strategis lainnya pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman nilai dasar BPK kepada pegawai, diantaranya dengan melakukan internalisasi budaya kerja “BERSATU” BPK Perwakilan Sulawesi Barat.

Gambar III.6 Internalisasi Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



Budaya kerja ini pada dasarnya mendukung nilai dasar BPK seperti halnya yang sudah digambarkan pada Bab II laporan kinerja ini. Jika melihat skala realisasi hasil survei pada indikator ini adalah sama dengan skala target yang ditetapkan, yaitu sangat memuaskan. Artinya meskipun tidak seluruhnya, secara garis besar pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah memahami, menerapkan/mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan pekerjaannya. BPK senantiasa memantau indeks ini dari tahun ke tahun, hasilnya perkembangan nilai indeks ini untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8 Perkembangan Capaian IK 7 Tahun 2019-2021

IK 7	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	5,00 (Sangat Memuaskan)	5,00 (Sangat Memuaskan)	5,00 (Sangat Memuaskan)
Realisasi	4,76 (Sangat Memuaskan)	4,67 (Sangat Memuaskan)	4,48 (Sangat Memuaskan)
Capaian	95,2	93,40	89,6
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	-0,09	-0,19

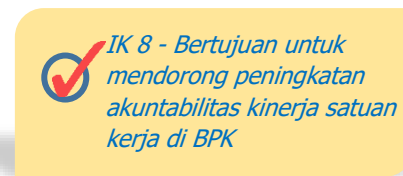
Berdasarkan tabel di atas, pergerakan angka penilaian indeks atas indikator tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah menurun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurangnya optimal dalam internalisasi pemahaman nilai dasar BPK menjadi salah satu penyebab turunnya angka

penilaian indeks ini. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tetap berupaya untuk memperbaiki pencapaian indikator ini dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin maupun strategis diantaranya, terus melakukan sosialisasi, internalisasi budaya kerja "BERSATU", internalisasi terkait visi, misi dan nilai dasar BPK kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

IK 8 | Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan gambaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = sangat memuaskan (>90 – 100)
- A = memuaskan (>80 – 90)
- BB = sangat baik (>70 – 80)
- B = baik (>60 – 70)
- CC = cukup (>50 – 60)
- C = kurang (>30 – 50)
- D = sangat kurang (0 – 30)



Berdasarkan nota dinas Inspektur Utama BPK RI nomor 413/ND/XI/09/2021 tanggal 21 September 2021 perihal penyampaian hasil evaluasi implementasi SAKIP, hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan menunjukkan hasil 93,41 dengan predikat AA (sangat memuaskan). Hasil ini didapat melalui pengukuran yang mencakup, antara lain:

- a. Perencanaan kinerja (bobot 30%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 100 atau mendapatkan *scoring* 30. Komponen-komponen yang dievaluasi adalah perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja tahunan;
- b. Pengukuran kinerja (bobot 25%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 95 atau mendapatkan *scoring* 23,75;
- c. Pelaporan kinerja (bobot 15%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 69,53 atau mendapatkan *scoring* 10,43;
- d. Evaluasi internal (bobot 10%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 100 atau mendapatkan *scoring* 10; dan
- e. Capaian kinerja (bobot 20%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 96,15 atau mendapatkan *scoring* 19,23.

Sehingga dari hasil penjumlahan atas setiap komponen di atas didapat angka 93,41 (30+23,75+10,43+10+19,23 = 93,41). Target yang ditetapkan pada tahun 2021 atas indikator ini adalah predikat A dengan skor 87,00. Dengan demikian, realisasi atas pencapaian indikator ini tercapai. Hasil evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.9 Perkembangan Capaian IK 8 Tahun 2019-2021

IK 8	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
Realisasi	A (86,68)	AA (92,47)	AA (93,41)
Capaian	NA	105	105
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	+5,79	+0,94

Realisasi pencapaian tahun 2021 dan kenaikan skor AKIP pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan implementasi SAKIP dengan pendekatan penilaian mandiri menggunakan aplikasi PRISMA SAKIP. Dengan adanya implementasi mandiri ini membuat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempelajari dan berkoordinasi dengan Inspektorat Utama BPK RI lebih intens. Implementasi penilaian SAKIP ini kemudian dilakukan revidi dan penilaian akhirnya oleh Inspektorat Utama. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa akan terus melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektur Utama terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Itama dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP, untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

IK 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pada masa era digitalisasi ini penggunaan teknologi informasi sangat membantu untuk memberikan pelayanan publik yang terpadu, efisien, efektif dan cepat, serta membantu dalam pelaksanaan tugas ataupun aktivitas keseharian setiap individu menjadi lebih mudah dan cepat. Namun tidak sedikit juga teknologi informasi banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya perlu mitigasi, perencanaan dan monitoring penggunaan teknologi informasi sehingga dampak negatif dari adanya teknologi informasi dapat diminimalisir.

BPK melalui Biro Teknologi dan Informasi (Biro TI) selalu mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Tentunya layanan teknologi informasi yang disediakan oleh Biro TI telah dilakukan pengujian serta memperhatikan faktor keamanan data. Layanan TI bagi seluruh pegawai meliputi, layanan dasar (*e-mail, e-drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI juga akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.



IK 9 - Bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa mendorong seluruh pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi informasi yang telah disediakan oleh Biro TI guna menunjang pelaksanaan tugas bagi masing-masing pegawai pada satuan kerja masing-masing. Hasilnya, selama Tahun 2021, pegawai di BPK Sulawesi Barat telah memaksimalkan pemanfaatan aplikasi seperti e-

mail BPK, SISDM, serta pemanfaatan aplikasi kelola tugas untuk melakukan presensi *online* dan mengisi aktivitas kegiatan harian. Pada Subauditorat BPK Sulawesi Barat, para pemeriksa 100% telah menggunakan aplikasi SiAP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan LKPD, dan memanfaatkan aplikasi SiPTL dalam melaksanakan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan, memanfaatkan aplikasi SIKAD dalam memutakhirkan data kerugian negara/daerah. Serta aplikasi-aplikasi lainnya seperti PRISMA, SMP. Seluruh pegawai juga telah memaksimalkan

aplikasi persuratan yang baru saja diluncurkan yaitu JASMIN untuk memonitoring surat masuk-keluar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Atas hal tersebut yang membuahkan hasil atas pencapaian indikator ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan nilai sebesar 98,59% yang dinilai oleh Biro TI. Target yang harus dipenuhi pada tahun 2021 atas indikator ini adalah sebesar 96%, atau dengan kata lain target telah tercapai.

Hasil capaian ini merupakan penjumlahan dari beberapa variabel sebagai berikut:

- Tingkat pemanfaatan layanan dasar (bobot 30%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 100%, atau mendapatkan skor pembobotan 30%;
- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum (bobot 25%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 94,37%, atau mendapatkan skor pembobotan 23,59%;
- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan (bobot 40%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 100%, atau mendapatkan skor pembobotan 40%; dan
- Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan (bobot 5%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 100%, atau mendapatkan skor pembobotan 5%.

Sehingga penjumlahan keseluruhan pembobotan adalah $(30\%+23,59\%+40\%+5\% = 98,59\%)$. Sementara itu jika melihat perbandingan pencapaian indikator ini pada tahun-tahun sebelumnya maka akan tampak sebagai berikut:

Tabel III.10 Perkembangan Capaian IK 9 Tahun 2019-2021

IK 9	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	95%	95%	96%
Realisasi	98,31%	98,59%	98,59%
Capaian	103,48	103,78	102,7
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	+0,28%	-

Jika mengacu pada tabel di atas, diketahui pencapaian indikator pemanfaatan TI tahun 2019 ke 2020 meningkat, dan tahun 2021 stabil/sama dengan pencapaian tahun 2020. Atas hasil ini, dikarenakan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan layanan aplikasi TI sehingga memberi dampak efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terutama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan lebih intens mendorong pegawai untuk selalu memanfaatkan aplikasi umum yaitu SISDM agar bisa mencapai 100%.

IK 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan usulan *best practice* tahun 2021 yang berjudul "**Sarana Penyimpanan Arsip Dokumentasi Kegiatan Melalui Portal**

Perwakilan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Nota Dinas (ND) Kepala Perwakilan nomor 276/ND/XIX.MAM/11/2021 kepada Direktorat PSMK untuk dapat di validasi lebih lanjut. Sampai dengan diselesaikannya laporan kinerja ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat belum mendapatkan jawaban atas hasil validasi usulan BP tahun 2021 oleh Direktorat PSMK. Dengan demikian kewajiban pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian BP dari perwakilan telah diselesaikan dan di laporkan.

Selain penyusunan *best practice*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menerapkan replikasi *best practice* yang berjudul **"Sinergitas Entitas dan Pelaksana BPK Terhadap Penyelesaian TLHP BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara"** sesuai ND Kepala Perwakilan nomor 247/ND/XIX.MAM/10/2021. *Best practice* yang direplikasi ini merupakan milik BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan BP ini dipilih untuk direplikasi adalah:



IK 10 - Bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan

- a. Masih rendahnya persentase penyelesaian TLHP oleh entitas di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Kendala atas lambatnya tindak lanjut sering tidak terkomunikasikan antara entitas dengan pelaksana BPK; dan
- c. Kurangnya pemahaman entitas terkait rekomendasi dan penyelesaian TLHP.

Untuk memberikan perbaikan kedepan atas BP ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menyampaikan rekomendasi atas penyempurnaan dalam mereplikasi BP ini yang disampaikan dalam *checklist* pemenuhan penerapan BP yang telah disampaikan kepada Direktorat PSMK.

Selain usulan BP dan replikasi BP, pada tahun 2021 telah direncanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan empat aktivitas manajemen pengetahuan. Hingga akhir tahun 2021 perencanaan tersebut telah terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat yang dilaksanakan secara *in house training* atas persiapan pemeriksaan LKPD TA 2020, laporan aktivitas manajemen pengetahuan ini telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui ND Kepala Perwakilan nomor 224/ND/XIX.MAM/09/2021;
- b. Reviu pasca aktivitas atas reviu LHP LKPD dan kinerja TA 2020, laporan aktivitas manajemen pengetahuan ini telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui ND Kepala Perwakilan nomor 142/ND/XIX.MAM/06/2021;
- c. Reviu pasca aktivitas atas pemaparan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), laporan aktivitas manajemen pengetahuan ini telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui ND Kepala Perwakilan nomor 181/ND/XIX.MAM/07/2021; dan
- d. Diklat yang dilaksanakan secara *in house training* atas aspek yuridis dalam bukti pemeriksaan, laporan aktivitas manajemen pengetahuan ini telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui ND Kepala Perwakilan nomor 295/ND/XIX.MAM/12/2021.

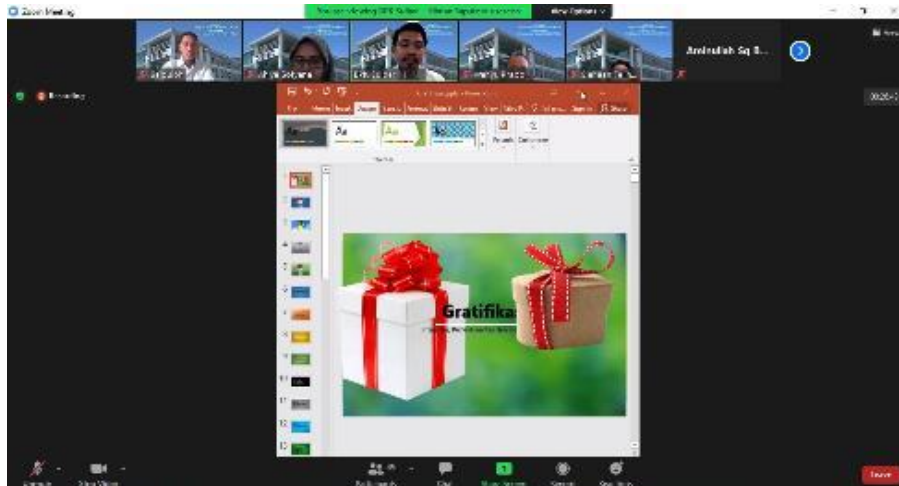
Sehingga dari keseluruhan aktivitas penerapan manajemen pengetahuan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, indikator tingkat penerapan manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, atau dengan kata lain indikator ini terpenuhi. Hasil ini didapat dengan menjumlahkan pembobotan atas beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tingkat penyusunan *best practice* (bobot 50%), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun usulan BP sehingga mendapatkan skor 100%. Hasil pembobotan menjadi 50%;

- b. Tingkat penerapan *best practice* (bobot 25%), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan replikasi BP sehingga mendapatkan skor 100%. Hasil pembobotan menjadi 25%; dan
- c. Tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (bobot 25%), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan sehingga mendapatkan skor 100%. Hasil pembobotan menjadi 25%.

Hasil penjumlahan pembobotan indikator ini adalah (50%+25%+25% = 100%).

Gambar III.7 Pemaparan PPG dalam Rangka Penerapan Manajemen Pengetahuan



Tercapainya target ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan, serta mengoptimalkan sosialisasi ataupun *coaching* yang diberikan Unit Kerja lain dalam hal ini Direktorat PSMK terkait penerapan manajemen pengetahuan. Jika melihat perkembangan pencapaian indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti tertera pada tabel di bawah, pencapaiannya adalah sama dan stabil. Hal ini dikarenakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan agar dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan kemajuan BPK.

Tabel III.11 Perkembangan Capaian IK 10 Tahun 2019-2021

IK 10	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	100%	100%
Realisasi	NA	100%	100%
Capaian	NA	100	100
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	-	-


Untuk meningkatkan capaian indikator ini akan semakin baik jika didorong dengan:

- a. Sistem *rewarding* atas usulan *Best Practice* dari satker yang terpilih menjadi *Best Practice* level BPK *Wide* secara lebih memadai;
- b. Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan *best practice* yang melibatkan satker di lingkungan BPK; dan
- c. Pengoptimalisasian tingkat penerapan/replikasi BP yang terbaik untuk setiap satker di lingkungan BPK, sehingga penerapan *best practice* dapat dilakukan secara menyeluruh.

IK 11 / Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Untuk mendapatkan hasil atas indikator ini, telah dilakukan survei oleh pihak ke-3 yang independen dan dipilih oleh BPK RI. Survei dikirimkan kepada para pemangku kepentingan untuk menilai kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Hasil survei diukur dengan skala 1-5, dengan klasifikasi per masing-masing skala adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

 **IK 11 - Bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.**

Berdasarkan hasil survei, indeks implementasi nilai dasar BPK pada tahun 2021 sebesar 4,11 (sangat memuaskan), adapun target yang ingin dicapai sebesar 3,80 (memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan indikator ini telah tercapai pada Tahun 2021. Artinya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif sehingga tercipta kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang baik diantara BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan *stakeholder*.

Gambar III.8 Sinergi dengan Instansi Vertikal
Kunjungan Kerja Kepala Perwakilan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa terus berkomitmen menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan secara terus menerus. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun ke belakang pencapaian indikator ini juga dapat terpenuhi.

Tabel III.12 Perkembangan Capaian IK 11 Tahun 2019-2021

IK 11	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	NA	3,80 (Memuaskan)	3,80 (Sangat Memuaskan)
Realisasi	NA	4,01 (Sangat Memuaskan)	4,11 (Sangat Memuaskan)
Capaian	NA	105	105
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	NA	+0,10

Pada tahun 2021 pencapaian indikator ini terpenuhi dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan tidak terlepas dari langkah nyata BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya adalah melakukan visitasi/kunjungan Kepala Perwakilan ke kantor entitas di wilayah Sulawesi barat dengan tujuan untuk mempererat hubungan kerja, koordinasi, kolaborasi dan sinergi. Serta melakukan visitasi/kunjungan ke beberapa instansi vertikal dengan tujuan hal yang sama yaitu mempererat hubungan kerja, koordinasi, kolaborasi dan sinergi. Karena dengan hal tersebut, akan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan akan membantu setiap langkah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan Renstra yang berimplikasi kepada tujuan BPK RI yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

IK 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada setiap pegawai bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan mutu, kemampuan, keterampilan, dan sikap mereka yang menjadi semakin lebih baik. Sehingga tercipta sumber daya manusia yang semakin unggul dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan ataupun isu dalam setiap penugasan di lingkungan BPK. Pemenuhan jam diklat untuk pengembangan kompetensi bagi PNS sendiri, khususnya di lingkungan BPK sudah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) paling tidak 80 jam pendidikan (JP) dalam 2 tahun.
- 2) Standar jam pelatihan untuk non pemeriksa yakni pejabat struktural maupun pejabat pelaksana sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 paling tidak 20 jam pendidikan (JP) dalam 1 tahun.
- 3) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun bagi para pemeriksa, dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.



IK 12 - Bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK

Untuk mendapatkan hasil persentase pencapaian atas indikator ini, maka dilakukan penghitungan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pemeriksa maupun non pemeriksa, dengan jumlah PNS yang telah mencapai target pemenuhan jam diklat untuk masing-masing pegawai. Batasan (*cut off*) perhitungan jumlah pegawai adalah per tanggal 30 September 2021. Artinya dalam hal

terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September 2021, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September 2021, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Sampai dengan tanggal 30 September 2021, jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan data *bezzetting* dari Subbag SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 69 orang. Terdiri dari 30 orang non pemeriksa dan 39 orang pemeriksa. Dari 69 orang, sebanyak 68 orang telah memenuhi target jam diklat berdasarkan data monitoring diklat sampai dengan akhir Desember 2021 serta jumlah sertifikat diklat yang terbit. Sehingga, realisasi pencapaian indikator ini adalah sebesar 98,55%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Artinya indikator ini belum terpenuhi di tahun 2021. Jika di *break down* pegawai berdasarkan kelompok pemeriksa dan non pemeriksa, pembagian pencapaian jam diklat adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa jumlah 39 orang, sebanyak 38 orang telah memenuhi jam diklat atau pencapaian untuk pegawai pemeriksa sebesar 97,44%. Dengan penjelasan satu orang yang belum memenuhi jam diklat merupakan pegawai yang akan segera memasuki masa purna bakti (pensiun);

- b. Non pemeriksa jumlah 30 orang, sebanyak 30 orang telah memenuhi jam diklat atau pencapaian untuk pegawai non pemeriksa sebesar 100%.

Ketidaktercapainya indikator ini pada tahun 2021 dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat masih kurang optimal dalam mendorong pegawai untuk melaksanakan Diklat. Untuk pencapaian indikator ini pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.13 Perkembangan Capaian IK 12 Tahun 2019-2021

IK 12	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	98,57%	98,55%
Capaian	100	98,57	98,55
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	-1,43%	-0,02%

Terlihat pada tabel di atas tren perkembangan indikator ini adalah turun hingga tahun 2021. Dapat dijelaskan pada tahun 2020 jumlah pegawai yang belum memenuhi minimal jam pelatihan adalah satu orang, sama dengan halnya pada tahun 2021. Namun persentase capaian berbeda, yaitu tahun 2021 lebih sedikit menurun dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai berdasarkan *bezzetting* pegawai tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2020. Namun demikian meskipun indikator ini menurun dan belum mencapai target pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan terus berupaya untuk memperbaiki pencapaian indikator ini dengan memfasilitasi, mempermudah dan mendorong pegawai dalam mencapai target pencapaian jam diklatnya. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang setiap pegawai terpenuhi target pencapaian jam diklatnya.

IK 13 | Tingkat Kinerja Anggaran

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- Capaian *output*;
- Penyerapan anggaran;
- Efisiensi; dan
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang



IK 13 - Bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut

memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan data Indikator Pelaksanaan Anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, hingga akhir tahun 2021 realisasi pencapaian indikator BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 86,69%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 87,5%. Artinya target indikator ini belum tercapai. Untuk menghitung hasil pencapaian indikator ini didapat dari perhitungan 2 variabel yaitu variabel nilai EKA yang didapat sebesar 85,75% dengan bobot skoring 60% sehingga di dapatkan 51,45%. Salah satu perhitungan skor variabel nilai EKA ini adalah angka efisiensi. Hingga akhir tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan skor efisiensi sebesar 2,74%. Kemudian nilai variabel EPA sebesar 88,1% dengan bobot skoring 40% sehingga di dapatkan 35,24%. Jadi total skor yang di dapatkan keseluruhan 86,69% (51,45% + 35,24%). Sedangkan jika melihat perkembangan pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Perkembangan Capaian IK 13 Tahun 2019-2021

IK 13	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	80%	87%	87,5%
Realisasi	85,26%	92%	86,69%
Capaian	150	105	99,07
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	NA	+6,74%	-5,31%

Indikator ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, dan tidak mencapai target pada tahun 2021 dikarenakan belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian, untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk optimalisasi pencapaian target indikator ini. Langkah yang dilakukan diantaranya melakukan pertemuan ataupun koordinasi dengan subbag keuangan serta antar bagian terkait untuk memonitoring dan melakukan pembahasan target pelaksanaan anggaran yang belum tercapai, maupun *action plan* yang harus dilakukan untuk memitigasi agar target kinerja anggaran tercapai untuk menghasilkan *output* yang berkualitas dan bermanfaat.

Realisasi Pencapaian IK Tahun Berjalan dengan Target Akhir Periode Renstra

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Barat 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, telah ditetapkan target pencapaian indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra 2020-2024. Pencapaian target indikator setiap tahunnya terus dilakukan pemantauan capaiannya, sehingga target indikator kinerja dapat terpenuhi pada akhir periode Renstra. Hal ini perlu dilakukan guna mendukung keberhasilan visi dan misi BPK tahun 2020-2024. Hasil pemantauan pencapaian indikator kinerja tahun 2021 dengan proyeksi target tahun 2024 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Pada lampiran tersebut tampak bahwa:

- Terdapat delapan indikator kinerja yang sampai dengan tahun 2021 realisasinya telah mencapai 100% bahkan lebih terhadap proyeksi target Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Indikator kinerja tersebut yaitu, IK2, IK4, IK5, IK6, IK8, IK10, dan IK11. Langkah berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini.
- Realisasi IK1 pada tahun 2021 terhadap target tahun 2024 baru mencapai 90%. Atas hal tersebut menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas *output LHP*, diantaranya dengan memperhatikan tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP. Sehingga diharapkan tahun 2024 target ini dapat dicapai.
- Realisasi IK 3 pada tahun 2021 terhadap target tahun 2024 baru mencapai 88,54%. Atas hal tersebut direncanakan untuk tahun-tahun berikutnya strategi yang akan dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Barat guna mendorong pencapaian indikator ini adalah dengan

- mempercepat penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan dengan melakukan PTLRHP secara *real time* mingguan dan/atau bulanan.
- d. Realisasi IK 7 pada tahun 2021 terhadap target tahun 2024 baru mencapai 89,6%. Dengan demikian hal yang perlu dilakukan adalah fokus untuk menanamkan internalisasi nilai dasar BPK dan budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yaitu "BERSATU" kepada seluruh pegawai. Harapannya dengan internalisasi tersebut akan mendorong peningkatan pemahaman implementasi nilai dasar BPK, sehingga tahun 2024 target Renstra dapat tercapai.
 - e. Realisasi IK 9 pada tahun 2021 terhadap target tahun 2024 baru mencapai 98,59%. Pemanfaatan TI akan lebih dioptimalkan dalam keseharian aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan pada akhir periode Renstra indikator ini dapat terpenuhi.
 - f. Realisasi IK 9 pada tahun 2021 terhadap target tahun 2024 baru mencapai 98,55%. Pada tahun 2021 upaya untuk mendorong pegawai melakukan diklat masih belum optimal. Namun hal ini telah dilakukan evaluasi penyebab tidak tercapainya indikator ini. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendorong seluruh pegawai negeri sipil untuk melaksanakan peningkatan kemampuannya melalui diklat. Harapannya indikator ini dapat terpenuhi pada tahun 2024.
 - g. Realisasi IK 13 pada tahun 2021 terhadap target tahun 2024 baru mencapai 97,40%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian, untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk optimalisasi pencapaian target indikator ini, sehingga target renstra atas indikator ini dapat terpenuhi.

B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran strategis serta target kinerja yang telah ditetapkan, perlu adanya dukungan pendanaan yang cukup dan komitmen dari pimpinan serta pemangku kepentingan. Dukungan pendanaan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat salah satunya adalah berupa alokasi APBN, yang realisasi penyerapan serta efisiensi penggunaan anggarannya juga turut dilakukan penilaian.

1. Capaian Realisasi Pemanfaatan Anggaran dan Capaian Realisasi Keluaran/ Output

Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berasal dari alokasi APBN. Pada tahun 2021 capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat didukung pemanfaatan (realisasi) anggaran adalah mencapai 97,44% atau mencapai senilai Rp15.402.757.884,00 dari alokasi anggaran yang ditetapkan senilai Rp15.807.010.000,00. Alokasi anggaran tersebut telah beberapa kali mengalami penyesuaian sebagai dampak pandemi Covid-19 dan adanya dampak dari bencana gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene pada pertengahan awal Januari 2021. Perincian pemanfaatan anggaran ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III.15 Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Keluaran Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi Keluaran/ Output	
				Qty	Satuan
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6.350.782.000,00	6.146.928.085,00	96,79		
a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	2.892.854.000,00	2.874.069.497,00	99,35	17	LHP
b. LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Banparpol)	104.796.000,00	101.296.700,00	96,66	75	LHP
c. Bahan Perumusan Pendapat	12.076.000,00	780.000,00	6,46	1	Rumusan Bahan Pendapat
d. Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Perwakilan	85.375.000,00	68.730.898,00	80,50	2	Sumbangan IHPS
e. Laporan Profil Entitas	18.686.000,00	7.406.334,00	39,64	14	Laporan
f. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	68.975.000,00	49.983.821,00	72,47	14	Laporan
g. Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	326.739.000,00	288.486.550,00	88,29	14	Laporan
h. LHP Interim/Pendahuluan	2.248.906.000,00	2.206.116.132,00	98,10	15	LHP Pendahuluan
i. Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	592.375.000,00	550.058.153,00	92,86	12	Laporan
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	9.456.228.000,00	9.255.829.799,00	97,88		
a. Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.606.539.000,00	1.547.700.173,00	96,34	20	Laporan
b. Layanan Sarana Internal	363.139.000,00	343.843.000,00	94,69	2	Paket
c. Layanan Prasarana Internal	119.006.000,00	119.006.000,00	100	1	Paket
d. Layanan Perkantoran	7.367.544.000,00	7.245.280.626,00	98,34	1	Paket
Total Anggaran dan Realisasi	15.807.010.000,00	15.402.757.884,00	97,44		
Sisa Anggaran (Total Realisasi Anggaran dikurangi Total Anggaran)	404.252.116,00				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yaitu meningkatnya hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat maka dibagi menjadi dua sasaran yang dituju. Masing-masing sasaran mendukung sasaran strategis Renstra. Sasaran 1 adalah meningkatnya pemeriksaan berkualitas yang dibagi kembali menjadi sembilan indikator keluaran yang harus dipenuhi guna mendukung pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Sasaran 2 adalah meningkatnya layanan pemeriksaan yang dibagi kembali menjadi empat indikator keluaran yang harus dipenuhi guna mendukung pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan tabel di atas juga tampak bahwa seluruh target *output* yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I telah terpenuhi di tahun 2021. Dengan kata lain realisasi *output* tahun 2021 mencapai 100%.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menteri Keuangan telah menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor (PMK) 22/PMK.02/2021 dengan melakukan pengunggahan data realisasi anggaran dan capaian keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 ke dalam aplikasi. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (*output*) program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan meliputi:

- a. Data capaian *output* program;
- b. Data capaian *output* kegiatan;
- c. Pagu anggaran; dan
- d. Realisasi anggaran.

Berdasarkan laporan bulanan atas manajemen internal perwakilan yang disampaikan kepada unit eselon I, pada akhir tahun 2021 pencapaian realisasi penyerapan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 97,44%, dan realisasi keluaran (*output*) mencapai 100%. Dapat diartikan bahwa, meskipun pemanfaatan penyerapan anggaran tidak mencapai 100% optimal, namun BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tetap dapat merealisasikan capaian target keluaran/*output* secara optimal 100%.

Untuk pencapaian atas indikator kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada akhir tahun 2021 angka efisiensi anggaran yang didapatkan adalah sebesar 2,74%. Angka tersebut dihitung berdasarkan formulasi efisiensi rincian *output* (RO) tingkat satuan kerja yang telah diatur pada PMK 22/PMK.02/2021. Kemudian dari angka efisiensi tersebut dilakukan perhitungan nilai efisiensi dengan rumus $NE = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ dengan penjelasan:

NE = Nilai Efisiensi

E_{RO} = Efisiensi rincian *output* = 2,74%

Hasilnya didapatkan nilai efisiensi pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 56,84% yang merupakan perhitungan dari $(50\% + \left(\frac{2,74}{20} \times 50\right))$. Sehingga dapat dimaknai bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi terhadap pemakaian anggaran dalam rangka pencapaian *output*.

C. Penjabaran Capaian Indikator Kinerja Keluaran Organisasi

Capaian kinerja keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 berdasarkan perhitungan yang didapatkan dari aplikasi PRISMA tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel III.16 Target dan Capaian Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2021

Sasaran Kegiatan / Sasaran / Keluaran	IKK No.	Indikator Kinerja Keluaran	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi				
Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas				
Laporan Hasil Pemeriksaan	1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%
Bahan Perumusan Pendapat	3	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%
Sumbangan IHPS Perwakilan	4	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%
Laporan Profil Entitas	5	Tingkat Kematakhiran Profil Entitas	100%	100%
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	6	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	7	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	100%
LHP Interim/Pendahuluan	8	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%	100%
Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	9	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%

Sasaran Kegiatan / Sasaran / Keluaran	IKK No.	Indikator Kinerja Keluaran	Target 2021	Realisasi 2021
Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan				
Layanan Manajemen Internal Perwakilan	10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	98%
Layanan Sarana Internal	11	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket
	12	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-
	13	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket
Layanan Prasarana Internal	14	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	1 Paket
Layanan Perkantoran	15	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	98,88%
	16	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%	97,62%

Penjelasan atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Keluaran (IKK) pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

IKK 1 / Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Pada tahun 2021 dalam rencana kerja pemeriksaan revisi terakhir pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merencanakan melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sendiri sebanyak 14 obrik pemeriksaan (pemeriksaan LKPD, Kinerja dan PDDT), serta Pemeriksaan atas Bantuan Kepada Partai Politik (Banparpol). Semester I telah dilaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD pada tujuh entitas di wilayah Sulawesi Barat yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa. Berbarengan dengan pemeriksaan LKPD, dilakukan pemeriksaan kinerja atas Infrastruktur pada Pemprov. Sulawesi Barat dalam rangka *Long Form Audit Report (LFAR)*. Total pemeriksaan dan *output* LHP LKPD maupun kinerja pada semester I mencapai delapan LHP. Selain itu pada semester I juga telah dilaksanakan pemeriksaan atas bantuan Keuangan Kepada 75 Partai Politik di wilayah Sulawesi Barat. Pada semester II telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja dan PDDT pada 6 obrik pemeriksaan dengan *output* sembilan LHP yang diserahkan kepada entitas, dengan rincian sebagai berikut:

- Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat, Pemkab. Mamuju, dan Pemkab. Polewali Mandar, dengan *output* tiga LHP;
- Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya, dengan *output* satu LHP;
- Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemkab. Mamuju Tengah, dengan *output* satu LHP;
- Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Polewali Mandar, dengan *output* satu LHP;
- PDDT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Sulawesi Barat, KPUD Kab. Mamuju, KPUD Kab. Majene, KPUD Kab. Pasangkayu, dan KPUD Kab. Mamuju Tengah TA 2020 dan 2021, dengan *output* dua LHP; dan

- f. PDTT atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya, dengan *output* satu LHP.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas seluruh pemeriksaan tersebut telah diselesaikan dan telah dilakukan penyerahan kepada entitas terkait. Total realisasi LHP yang telah dirampungkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat hingga akhir tahun 2021 adalah sebanyak 92 LHP (7 LHP LKPD + 1 LHP Kinerja (LFAR) + 75 LHP Banparpol + 6 LHP Kinerja + 3 LHP PDTT).

Kriteria untuk mengukur indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Keuangan adalah dua bulan setelah Laporan Keuangan *unaudited* diserahkan oleh Entitas;
- 2) Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Kinerja dan PDTT adalah berdasarkan P2;
- 3) Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:
 - a) Penyampaian tepat waktu = 100%
 - b) Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
 - c) Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
 - d) Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Rincian atas pencapaian target ketepatan waktu penyampaian LHP dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Seluruh LHP yang terbit telah diselesaikan dan diserahkan secara tepat waktu kepada pimpinan entitas terkait. Dengan hal itu maka pencapaian IKK ini terpenuhi 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Ketepatan waktu penyampaian LHP ini harapannya dapat membuat Pemerintah Daerah lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dan dapat lebih cepat memberikan keputusan bagi pimpinan daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pencapaian ini dikarenakan optimalisasi manajemen waktu dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

IKK 2 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Partai politik (parpol) berperan dalam menguatkan pelaksanaan kehidupan demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, parpol membutuhkan sumber daya untuk mengoperasikan struktur dasar partai sehingga parpol dapat berkontribusi dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan mengedepankan kepentingan publik. Parpol memerlukan dana yang tidak sedikit dalam melaksanakan kegiatannya. Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD (LPJ Banparpol) kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerima LPJ Banparpol DPD/DPC atau sebutan lain seluruh partai politik di wilayah se-Sulawesi Barat. Keseluruhan LPJ juga telah dirampungkan pelaksanaan pemeriksaannya oleh BPK, dan menghasilkan keluaran

berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Partai Politik (LHP Banparpol). Total LHP Banparpol yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada entitas berjumlah 75 LHP. LHP Banparpol memuat kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan bantuan keuangan dari APBD kepada partai politik, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengukur keberhasilan ketepatan waktu penyampaian LHP Banparpol ini adalah berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik pada pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK. Untuk penilaian persentase ketepatan waktu adalah sebagai berikut:

- Penyampaian tepat waktu = 100%
- Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Hasilnya 75 LHP Banparpol telah diserahkan kepada entitas terkait dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan LHP Banparpol secara tepat waktu sesuai peraturan BPK No. 2 Tahun 2015. Atas hal itu indikator keluaran ini berhasil mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Ketepatan waktu penyampaian LHP Banparpol ini harapannya dapat membuat Partai Politik dan Pemerintah Daerah lebih cepat dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan dan dapat lebih cepat memberikan keputusan untuk memperbaiki tata kelola keuangan parpol, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Secara detail rincian LHP Banparpol dan pengukuran ketepatan waktu dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

IKK 3 | Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat

Usulan bahan pendapat merupakan penyampaian pendapat dari setiap satker kepada unit kerja eselon I untuk dikaji lebih lanjut menjadi konsep pendapat BPK. Pendapat BPK merupakan masukan BPK yang sewaktu-waktu dapat disampaikan kepada Pemerintah.

Pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan usulan bahan pendapat kepada unit kerja eselon I melalui Direktorat EPP sebanyak dua usulan. Penyampaian usulan pertama dikirimkan melalui nota dinas Kepala Perwakilan nomor 238/ND/XIX.MAM/09/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditujukan kepada Direktorat EPP. Usulan bahan pendapat pertama berjudul "**Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.**" Usulan tersebut mendapatkan tanggapan dari Direktorat EPP melalui nota dinas nomor 610/ND/XII.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa, usulan bahan pendapat belum dapat diterima karena telah terdapat usulan bahan pendapat sejenis tentang pengalihan PBB-P2.

Usulan bahan pendapat kedua dikirimkan pada tanggal 17 November 2021 kepada Direktorat EPP melalui nota dinas Kepala Perwakilan nomor 282/ND/XIX.MAM/11/2021. Usulan bahan pendapat kedua ini berjudul "**Pengendalian Pengelolaan Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat belum Optimal.**" Usulan bahan pendapat tersebut diterima oleh Direktorat EPP sesuai dengan penyampaian Nota Dinas dari Direktorat EPP No. 684/ND/XII.2/11/2021 tanggal 30 November 2021, perihal penyampaian tanggapan atas usulan bahan pendapat.

Atas hal tersebut pencapaian atas indikator keluaran ini adalah 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, atau dengan kata lain realisasi indikator keluaran ini tercapai. Usulan bahan pendapat ini juga merupakan salah satu wujud BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang

senantiasa mendukung sasaran strategis BPK, yang tertuang pada Renstra BPK Tahun 2020-2024. Selain itu pencapaian ini juga dikarenakan adanya dorongan dan komitmen dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi BPK dalam menjalankan amanat yang tertuang dalam UU nomor 15 tahun 2006 pada pasal 11 yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lainnya, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

IKK 4 | Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP

Indikator keluaran ini mengukur ketercapaian penyelesaian input data hasil pemeriksaan (rekomendasi) ke dalam aplikasi SMP. Selama tahun 2021, penginputan data dilakukan sebanyak dua kali yaitu:

a. Semester I tahun 2021

Penginputan hasil pemeriksaan kinerja yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan pada semester II tahun 2020. Jumlah rekomendasi berdasarkan *output* LHP kinerja semester II tahun 2020 sebanyak 116 rekomendasi dari 6 LHP, dan keseluruhannya telah diinput pada aplikasi SMP.

b. Semester II tahun 2021

Penginputan hasil pemeriksaan LKPD yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan pada semester I tahun 2021. Jumlah rekomendasi berdasarkan *output* LHP LKPD TA 2020, dan LHP Kinerja dalam rangka LFAR dimana pemeriksaan dilakukan pada semester I tahun 2021 adalah sebanyak 304 rekomendasi dari 8 LHP, dan keseluruhannya telah diinput pada aplikasi SMP.

Proses penginputan ke dalam aplikasi SMP telah dilakukan reviu secara berjenjang mulai internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, hingga dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan oleh Direktorat EPP. Hal ini dilakukan agar hasil data yang masuk pada aplikasi SMP sudah layak dan terpenuhinya proses *Quality Assurance* untuk menjamin kualitas *output* pemeriksaan. Selain itu, data yang sudah diinput ke dalam aplikasi SMP merupakan sumber bahan penyusunan IHPS BPK. Sehingga selama tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun dua *output* sumbangan IHPS (pada semester I dan semester II tahun 2021).

Variabel untuk mengukur pencapaian indikator keluaran ini adalah persentase penyelesaian input data hasil pemeriksaan (rekomendasi) dibagi dengan jumlah LHP yang terbit. Dari 14 LHP dengan total 420 rekomendasi (116 + 304) keseluruhannya telah selesai diinput pada aplikasi SMP. Atas hal tersebut pencapaian atas indikator keluaran ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan pengoptimalan pemakaian teknologi informasi dalam melakukan manajemen pemeriksaan. Dengan tercapainya indikator ini, harapannya BPK Sulawesi Barat dapat memberikan sumbangan bahan IHPS yang lebih cepat, untuk pengambilan keputusan pimpinan BPK yang lebih cepat.

IKK 5 | Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas

Pemutakhiran profil entitas merupakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, agar selalu meng*update* perkembangan data tentang profil entitas pemeriksaan di lingkup wilayah Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan agar seluruh pegawai BPK khususnya pemeriksa, ataupun stakeholder memahami gambaran umum entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 BPK Perwakilan Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan pemutakhiran profil entitas tiap semesternya. Dengan demikian, *output* yang dihasilkan berupa dua laporan profil entitas No. 01/LPE/XIX.MAM/07/2021 dan 02/LPE/XIX.MAM/12/2021.

Atas pencapaian hal tersebut, maka pelaksanaan indikator ini menghasilkan *output* profil entitas yang mutakhir, dan tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian

ini disebabkan adanya pelibatan aktif dari seluruh pemeriksa untuk menyusun laporan profil entitas dan pemutakhiran *database* entitas pemeriksaan sehingga dapat mempercepat penyelesaian realisasi laporan.

IKK 6 | Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Selain melaksanakan kegiatan pemeriksaan, BPK juga terus berkomitmen melakukan pemantauan secara berkala pada Pemerintah Daerah atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dilakukannya pemantauan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil rekomendasi BPK dan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yang tertuang pada Renstra BPK tahun 2020-2024 yaitu "**Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi**, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara."

Sampai dengan akhir tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (PTLRHP) pada tujuh entitas di wilayah Sulawesi Barat yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Sehingga *output* yang dihasilkan dari indikator ini adalah sebanyak 14 kali pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Pelaksanaan PTLRHP dilakukan menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), dan dimutakhirkan status pencapaian tindak lanjut pada SIPTL. Pelaksanaan tersebut terdiri dari pengadministrasian dokumen tindak lanjut entitas, penelaahan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh entitas, hingga verifikasi dan validasi oleh pimpinan BPK atas pengajuan pemutakhiran status tindak lanjut. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini adalah PTLRHP telah dilakukan dan dimutakhirkan setiap semester. Atau dengan kata lain jika telah dilakukan pelaksanaan PTLRH dan telah dimutakhirkan setiap semester, maka indikator ini terpenuhi.

Berdasarkan *output* yang telah dicapai dan dengan melihat kriteria pengukuran indikator ini, tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini salah satunya dikarenakan pelaksanaan PTLRHP telah dilakukan sebanyak oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Kegiatan tersebut diperintahkan langsung berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan, dan dimutakhirkan langsung menggunakan SIPTL. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung sasaran strategis BPK agar meningkatnya pemanfaatan rekomendasi.

IKK 7 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah

Selain melaksanakan kegiatan PTLRHP, BPK juga terus berkomitmen melakukan pemantauan secara berkala pada Pemerintah Daerah atas kerugian negara/daerah oleh bendahara maupun non bendahara. Dilakukannya pemantauan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta **penyelesaian ganti kerugian negara** yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi".

Sampai dengan akhir tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan pemantauan kerugian negara/daerah (KNKD) pada tujuh entitas se-Sulawesi Barat sebanyak dua kali. Sehingga *output* yang dihasilkan dari indikator ini adalah sebanyak 14 laporan pemantauan KNKD. Pelaksanaan pemantauan KNKD juga mengoptimalkan fungsi Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah berdasarkan input data ke Aplikasi SIKAD sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat EPP setiap semesternya.
- b. Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:
 - 1) Penyampaian tepat waktu = 100%
 - 2) Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
 - 3) Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
 - 4) Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Berdasarkan *output* yang telah dicapai dan dengan melihat kriteria pengukuran indikator ini, tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini salah satunya dikarenakan pelaksanaan pemantauan KNKD dilakukan dengan mengoptimalkan tenaga pemeriksa setelah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lapangan. Hal ini berguna agar tidak mengganggu ketika melakukan pemantauan KNKD di lapangan, dan pemeriksa dapat lebih fokus menyelesaikan laporan pemantauan KNKD. Pencapaian indikator ini merupakan salah satu wujud komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung sasaran strategis BPK agar meningkatnya pemanfaatan pertimbangan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

IKK 8 / Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan

Laporan interim/pendahuluan merupakan laporan yang disusun oleh tim pemeriksa atas hasil pemeriksaan interim/pendahuluan sebelum dilaksanakannya pemeriksaan terinci. Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan interim/pendahuluan salah satunya adalah untuk pemahaman dan pendalaman proses bisnis Pemerintah Daerah, mengidentifikasi risiko, menilai SPI awal, ataupun identifikasi awal permasalahan-permasalahan awal atas pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

Selama tahun 2021 BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan pemeriksaan interim/pendahuluan sebanyak 14 obrik pemeriksaan. Pada Semester I dilakukan pemeriksaan pendahuluan LKPD TA 2020 sebanyak 7 obrik pemeriksaan dan pemeriksaan pendahuluan kinerja dalam rangka LPAR pada 1 obrik pemeriksaan. Pada semester II telah dilaksanakan enam obrik pemeriksaan dengan *output* tujuh LHP pendahuluan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kinerja atas Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat, Pemkab. Mamuju, dan Pemkab. Polewali Mandar, dengan *output* satu LHP pendahuluan;
- b. Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya, dengan *output* satu LHP pendahuluan;
- c. Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemkab. Mamuju Tengah, dengan *output* satu LHP pendahuluan;
- d. Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Polewali Mandar, dengan *output* satu LHP pendahuluan;
- e. PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Sulawesi Barat, KPUD Kab. Mamuju, KPUD Kab. Majene, KPUD Kab. Pasangkayu, dan KPUD Kab. Mamuju Tengah TA 2020 dan 2021, dengan *output* dua LHP pendahuluan; dan

- f. PDDT atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya, dengan *output* satu LHP pendahuluan.

Untuk mengukur pencapaian ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria ketepatan waktu penyelesaian laporan interim/pendahuluan adalah P2
b. Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:
1) Penyelesaian tepat waktu = 100%
2) Penyelesaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
3) Penyelesaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
4) Penyelesaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Membandingkan batas waktu penyelesaian LHP pendahuluan pada program pemeriksaan (P2) dan tanggal selesainya laporan interim/pendahuluan (tanggal LHP pendahuluan), didapatkan hasil bahwa indikator ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan 100%. Artinya laporan interim/pendahuluan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan batasan waktu yang telah tercantum pada P2. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas hasil pemeriksaan. Pencapaian ini dikarenakan dorongan dari manajemen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat agar pemeriksaan pendahuluan dapat lebih cepat diselesaikan agar dapat membuat keputusan yang tepat dan pasti terkait langkah-langkah yang bisa diambil dalam bekal pelaksanaan pemeriksaan terinci. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan akan memberikan *output* yang bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

IKK 9 / Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan

Output yang dihasilkan pada indikator ini adalah layanan manajemen pemeriksaan perwakilan. Layanan manajemen pemeriksaan dilakukan guna mendukung tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam memeriksa dan mengelola tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup wilayah Sulawesi Barat. Layanan manajemen pemeriksaan kemudian dituangkan dalam sebuah laporan manajemen pemeriksaan yang dilaporkan setiap bulannya. Layanan manajemen pemeriksaan itu sendiri diantaranya terdiri dari:

- a. Pelaksanaan layanan dukungan manajemen pemeriksaan;
b. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan;
c. Pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
d. Pelaksanaan reviu atas hasil pemeriksaan; dan
e. Pelaksanaan pengelolaan manajemen SIKAD.

Hasil capaian keluaran (*output*) indikator ini bersumber pada laporan manajemen pemeriksaan yang disampaikan setiap bulan, dengan batas waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan yang ditetapkan adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Kriteria pembobotan ketepatan waktu adalah sebagai berikut:

- Penyampaian tepat waktu = 100%
- Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Hingga akhir tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan target pencapaian indikator ini adalah sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini dikarenakan PPK pelayanan manajemen pemeriksaan dan Subauditorat BPK Sulawesi Barat telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan manajemen pemeriksaan Bulan Januari-Desember 2021 tepat waktu.

IKK 10 / Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan

Output yang dihasilkan pada indikator ini adalah layanan manajemen internal perwakilan yang terdiri dari:

- a. Laporan bulanan yaitu laporan pelaksanaan kegiatan satuan kerja kepada unit kerja di atasnya. Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Laporan kinerja terdiri dari:
 - 1) Laporan kinerja tahunan yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Laporan kinerja triwulanan yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah Triwulan berakhir.
- c. Laporan dan Profil Risiko terdiri dari:
 - 1) Laporan penerapan manajemen risiko semester II T-1 dan Tahunan. (T-1) disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Laporan penerapan manajemen risiko semester I tahun T disampaikan paling lambat satu bulan setelah semester berakhir.
 - 3) Profil risiko disampaikan paling lambat mengikuti Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK.

Untuk mengukur pembobotan ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen internal perwakilan diukur menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Penyampaian tepat waktu = 100%
- Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Hingga akhir tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pencapaian atas indikator keluaran ini adalah sebesar 98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Ketidaktercapainya indikator ini dikarenakan penyampaian laporan bulan Januari 2021 yang terlambat satu hari, laporan pemantauan risiko Semester II tahun 2020 yang terlambat di atas 10 hari, dan laporan penerapan manajemen risiko tahun 2020 yang terlambat disampaikan di atas 10 hari. Keterlambatan laporan bulan ini salah satu penyebabnya dikarenakan adanya kondisi gempa bumi yang melanda wilayah Mamuju, Sulawesi Barat dan berdampak pada gedung kantor BPK Sulawesi Barat dan membuat sebagian dokumen tercecer ataupun tertimpa reruntuhan bangunan. Hal ini yang membuat proses penyusunan laporan tertunda. Namun untuk tahun berikutnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan dokumen elektronik sebagai salah satu langkah mitigasi jika terjadi kejadian yang tidak terduga.

IKK 11 / Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Guna mendukung kegiatan operasional BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan pelayanan yang optimal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memandang perlu melakukan pengadaan kendaraan bermotor. Selain itu pengadaan kendaraan bermotor tersebut bertujuan untuk mengganti kendaraan yang telah lama digunakan. Sebelum melakukan pengadaan kendaraan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penjualan melalui prosedur lelang atas kendaraan yang telah lama digunakan dan akan digantikan dengan kendaraan baru. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan pengadaan ini pada Tahun 2021 satu paket senilai Rp354.139.000,00, dan telah terealisasi sampai Triwulan IV tahun 2021 satu paket senilai Rp334.900.000,00 (94,57% penyerapan anggaran).

Pencapaian indikator ini dikatakan mencapai 100% jika telah dilakukan realisasi pembelian kendaraan sebanyak satu paket. Dengan demikian, karena pengadaan kendaraan bermotor telah terealisasi sebanyak satu paket, maka indikator keluaran ini telah tercapai pada tahun 2021.

Pencapaian ini dikarenakan koordinasi intens yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan kementerian keuangan melalui Dirjen terkait guna memperlancar proses pelelangan barang milik negara (kendaraan lama yang akan dijual). Sehingga setelah proses pelelangan selesai, dapat dilakukan penarikan dana untuk membiayai pengadaan kendaraan baru.

IKK 12 | Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi merupakan sub *output* dari layanan sarana internal. Pengadaan ini berupa pembelian perangkat TI untuk kebutuhan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan pengadaan ini pada awal Tahun 2021 sebesar Rp9.000.000,00, Namun melihat kebutuhan dan prioritas anggaran, BPK Perwakilan Sulawesi Barat melakukan pergeseran anggaran pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi ke anggaran pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan alat-alat kesehatan penunjang di poliklinik. Revisi atas keluaran anggaran ini telah disahkan dalam revisi ke-2 dalam DIPA BPK Perwakilan Sulawesi Barat tanggal 3 Agustus 2021. Sehingga IKK ini tidak dapat dipenuhi karena telah dilakukan pergeseran atas anggarannya.

IKK 13 | Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran juga merupakan sub *output* dari layanan sarana internal. Pengadaan ini berupa pengadaan mesin dan peralatan lainnya dan pengadaan fasilitas kantor. Hal ini berguna untuk menunjang kegiatan pemeriksaan serta kegiatan penunjang pendukung.

Pada awalnya ditetapkan anggaran tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak menganggarkan pengadaan ini pada Tahun 2021. Namun melihat kebutuhan dan prioritas, BPK Perwakilan Sulawesi Barat melakukan pergeseran anggaran pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi ke anggaran pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan alat-alat kesehatan penunjang di poliklinik satu paket senilai Rp9.000.000,00. Revisi atas keluaran anggaran ini telah disahkan dalam revisi ke-2 dalam DIPA BPK Perwakilan Sulawesi Barat tanggal 3 Agustus 2021. Sampai dengan akhir tahun 2021, keluaran ini telah terealisasi sebanyak satu paket senilai Rp8.943.000,00, sehingga indikator pencapaian ini telah terpenuhi. Pencapaian ini dikarenakan telah dilakukan pembelian pengadaan alat kesehatan penunjang poliklinik sebanyak satu paket.

IKK 14 | Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan merupakan sub *output* dari layanan prasarana internal. Pengadaan ini berupa perawatan gedung kantor dan rumah jabatan. Hal ini berguna agar memberikan kenyamanan bekerja bagi para pegawai di BPK, selain itu juga untuk menjaga dan merawat gedung bangunan dan rumah jabatan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan belanja perawatan gedung kantor dan rumah jabatan pada kelompok layanan prasarana internal sebanyak satu paket senilai Rp119.006.000,00, dan telah terealisasi sebanyak satu paket senilai Rp119.006.000 sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2021. Deman demikian, pengadaan ini seluruhnya telah terealisasi, dan indikator keluaran ini telah terpenuhi. Pengadaan pada output keluaran ini direncanakan terealisasi pada triwulan III, namun karena adanya faktor musibah alam yang menimpa wilayah Mamuju pada 15 Januari 2021 yang berdampak rusaknya bangunan gedung kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat dengan kategori sedang, sehingga mendorong indikator ini agar segera direalisasikan pada triwulan I. Atas hal tersebut, pada triwulan I telah dilakukan pencairan atas indikator ini guna menanggulangi dampak kerusakan gempa bumi tersebut.

IKK 15 / Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan merupakan hak pegawai atas kinerja yang diberikan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pembayaran gaji dan tunjangan merupakan salah satu *output* dari layanan perkantoran. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan gaji dan tunjangan senilai Rp4.201.181.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp4.154.127.759,00 atau terealisasi sebesar 98,88% dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 95%. Artinya tahun 2021 indikator keluaran ini telah terpenuhi. Pencapaian indikator keluaran ini dikarenakan komitmen bersama setiap unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan pemantauan anggaran serta koordinasi yang intens dilakukan antara subbag keuangan dengan unit kerja lainnya.

IKK 16 / Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Layanan operasional dan pemeliharaan kantor merupakan layanan yang diberikan oleh masing-masing subbagian di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan operasional di masing-masing subbagian, yaitu Subbag Humas & TU, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum & TI. Untuk indikator keluaran ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan senilai Rp3.166.363.000,00 dan sudah terealisasi hingga akhir tahun 2021 senilai Rp3.091.152.786,00 atau 97,62% sudah terealisasi dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 95%. Artinya indikator keluaran ini tercapai, hal ini dikarenakan koordinasi yang intens dengan melakukan rapat yang rutin untuk melihat perkembangan pencapaian indikator ini antara subbag dengan subbag keuangan.



Penyerahan LHP secara daring, BAST LHP yang telah ditandatangani ditunjukkan kepada entitas

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ini merupakan sumbangan penyusunan Lakin AKN VI BPK RI dan sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi dan misi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada periode tahun kedua Renstra 2020-2024 adalah sebesar 99,49. Skor ini mengalami penurunan sebesar 0,38 dibandingkan dengan skor kinerja tahun 2020 yaitu sebesar 99,87. Capaian skor tahun 2021 ini akan menjadi bahan koreksi dan acuan penyempurnaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja utama pada tahun ini yang belum mencapai target adalah sebagai berikut:

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
4. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya keempat IK tersebut adalah:

1. Terdapat catatan-catatan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Direktorat EPP terkait tingkat konsistensi pada empat *output* LHP LKPD TA 2020.
2. Belum optimalnya internalisasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terkait pemahaman nilai dasar BPK kepada seluruh pegawai. Indeks implementasi nilai dasar BPK, diukur dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan dipilih oleh BPK. Hasil dari kuesioner tersebut kemudian menjadi dasar penilaian atas indikator ini.
3. Terdapat pegawai yang belum mencapai target jam diklat dalam periode tahun 2021 sesuai aturan yang berlaku.
4. Masih terdapat indikator penilaian pelaksanaan anggaran yang belum terpenuhi, sehingga pengelolaan pelaksanaan anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat belum optimal.

Agar dapat memenuhi target di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan menjalankan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Memperbaiki catatan-catatan dan rekomendasi terkait tingkat konsistensi dan tingkat akurasi LHP dari Direktorat EPP, untuk meningkatkan penilaian hasil pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu, sehingga menghasilkan *output* LHP yang lebih berkualitas.
2. Memperkuat internalisasi pemahaman visi dan misi BPK dilingkup perwakilan Sulawesi Barat serta menekankan kepada pegawai terkait pentingnya implementasi nilai dasar BPK dalam lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta lebih menguatkan budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yaitu "BERSATU."
3. Berkoordinasi dengan Subauditorat dan atau Sekretariat Perwakilan agar senantiasa mendorong para pegawai untuk memenuhi minimal jam pendidikan yang wajib dicapainya. Serta memfasilitasi, mempermudah dan mendorong pegawai dalam mencapai target pencapaian jam diklatnya.
4. Memonitoring dan melakukan pembahasan target pelaksanaan anggaran yang belum tercapai, menyiapkan *action plan* yang harus dilakukan untuk memitigasi agar target kinerja anggaran tercapai sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas dan bermanfaat.

Dalam mendorong upaya pencapaian target kinerja tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa akan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja. Penyusunan Lakin BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk menjadi bahan catatan penting dan untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

LAMPIRAN

Perbandingan Pencapaian Realisasi Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

IK No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	80%	80%	85%	75,26%	88,54%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,51%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,36%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,48)	89,6%
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	A (87,00)	A (87,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (93,41)	103,73%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,59%	98,59%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,85)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,95)	Sangat Memuaskan (4,00)	Sangat Memuaskan (4,11)	102,75
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	98,55%	98,55%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	86,69%	97,40%

No.	Nama Pemeriksaan	Surat Tugas				Realisasi Pelaporan Pemeriksaan						% Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Jumlah LHP Diterbitkan	
		Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nomor LHP	Tanggal Penyerahan LK dari Entitas	Tanggal P2 (Kinerja/DTT)	Tanggal Penyampaian LHP Seharusnya	Tanggal BAST	Tanggal Surat Keluar			
Pemeriksaan Keuangan													700%	7
1	LKPD Pemerintah Kab. Polewali Mandar TA 2020	46/ST/XIX.MAM/03/2021	31-Mar-21	5-Apr-21	4-May-21	09.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 09.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	26-Mar-21	-	25-May-21	25-May-21	21-May-21	100%	1	
2	LKPD Pemerintah Kab. Mamuju Tengah TA 2020	47/ST/XIX.MAM/03/2021	31-Mar-21	5-Apr-21	4-May-21	10.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	26-Mar-21	-	25-May-21	25-May-21	21-May-21	100%	1	
3	LKPD Pemerintah Kab. Pasangkayu TA 2020	48/ST/XIX.MAM/03/2021	31-Mar-21	5-Apr-21	4-May-21	11.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 11.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	25-Mar-21	-	24-May-21	24-May-21	24-May-21	100%	1	
4	LKPD Pemerintah Kab. Mamasa TA 2020	49/ST/XIX.MAM/03/2021 50/ST/XIX.MAM/03/2021	31-Mar-21	5-Apr-21	4-May-21	12.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	30-Mar-21	-	29-May-21	28-May-21	3-Jun-21	100%	1	
5	LKPD Pemerintah Prov. Sulawesi Barat TA 2020	45/ST/XIX.MAM/03/2021	31-Mar-21	5-Apr-21	4-May-21	13.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 13.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	29-Mar-21	-	28-May-21	28-May-21	27-May-21	100%	1	
6	LKPD Pemerintah Kab. Mamuju TA 2020	55/ST/XIX.MAM/04/2021	5-Apr-21	12-Apr-21	11-May-21	15.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 15.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	5-Apr-21	-	4-Jun-21	3-Jun-21	3-Jun-21	100%	1	
7	LKPD Pemerintah Kab. Majene TA 2020	58/ST/XIX.MAM/04/2021	6-Apr-21	12-Apr-21	11-May-21	14.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 14.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	6-Apr-21	-	5-Jun-21	3-Jun-21	3-Jun-21	100%	1	
Pemeriksaan Kinerja													700%	7
1	Kinerja Peningkatan Infrastruktur Pada Pemerintah Prov. Sulawesi Barat TA 2020	44/ST/XIX.MAM/03/2021	31-Mar-21	5-Apr-21	4-May-21	13.C/LHP/XIX.MAM/05/2021	-	1-Apr-21	5-Jun-21	28-May-21	27-May-21	100%	1	
2	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemkab. Mamuju Tengah	173/ST/XIX.MAM/10/2021	6-Oct-21	7-Oct-21	5-Nov-21	20/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
3	Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov. Sulawesi Barat	177/ST/XIX.MAM/10/2021	11-Oct-21	14-Oct-21	12-Nov-21	18.A/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
4	Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemkab. Mamuju	177/ST/XIX.MAM/10/2021	11-Oct-21	14-Oct-21	12-Nov-21	18.B/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
5	Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemkab. Polewali Mandar	177/ST/XIX.MAM/10/2021	11-Oct-21	14-Oct-21	12-Nov-21	18.C/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
6	Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemprov. Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya	176/ST/XIX.MAM/10/2021	11-Oct-21	14-Oct-21	12-Nov-21	19/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	7-Oct-21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
7	Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Polewali Mandar	178/ST/XIX.MAM/10/2021 186/ST/XIX.MAM/10/2021	11-Oct-21 25-Oct-21	18-Oct-21	16-Nov-21	21/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu													300%	3
1	PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada KPUD Prov. Sulawesi Barat, KPUD Kab. Mamuju, KPUD Kab. Majene, KPUD Kab. Pasangkayu, dan KPUD Kab. Mamuju Tengah TA 2020 dan 2021	172/ST/XIX.MAM/10/2021	6-Oct-21	7-Oct-21	5-Nov-21	16.A/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
2	PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Prov. Sulawesi Barat, Bawaslu Kab. Mamuju, Bawaslu Kab. Majene, Bawaslu Kab. Pasangkayu, dan Bawaslu Kab. Mamuju Tengah TA 2020 dan 2021	172/ST/XIX.MAM/10/2021	6-Oct-21	7-Oct-21	5-Nov-21	16.B/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
3	Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemkab. Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya	182/ST/XIX.MAM/10/2021 183/ST/XIX.MAM/10/2021	25-Oct-21	25-Oct-21	23-Nov-21	17/LHP/XIX.MAM/12/2021	-	Oct 21	31-Dec-21	23-Dec-21	21-Dec-21	100%	1	
												1700%	17	

Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol (Banparpol)

Lampiran 2

No.	Nama Partai Politik	Surat Tugas				Realisasi Pelaporan Pemeriksaan						% Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Jumlah LHP Diterbitkan
		Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nomor LHP	Tanggal Penyerahan LK dari Entitas	Tanggal P2 (Kinerja/DTT)	Tanggal Penyampaian LHP Seharusnya	Tanggal BAST	Tanggal Surat Keluar		
	Kabupaten Majene	26/ST/XIX.MAM/03/2021	3-Mar-21	9-Mar-21	19-Mar-21								
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa					01.A/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya					01.B/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
3	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan					01.C/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
4	DPD Partai Golongan Karya					01.D/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
5	DPD Partai Keadilan Sejahtera					01.E/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
6	DPC Partai Persatuan Pembangunan					01.F/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
7	DPD Partai Amanat Nasional					01.H/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
8	DPD Partai Solidaritas Indonesia					01.G/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
9	DPC Partai Hati Nurani Rakyat					01.I/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
10	DPC Partai Demokrat					01.J/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Feb-21	8-Mar-21	6-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
	Kabupaten Polewali Mandar	27/ST/XIX.MAM/03/2021	3-Mar-21	9-Mar-21	19-Mar-21								
1	DPD Partai Amanat Nasional					03.A/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
2	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan					03.B/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
3	DPC Partai Demokrat					03.C/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
4	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya					03.D/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
5	DPD Partai Golongan Karya					03.E/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
6	DPC Partai Hati Nurani Rakyat					03.F/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
7	DPC Partai Kebangkitan Bangsa					03.G/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera					03.H/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
9	DPD Partai Nasdem					03.I/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
10	DPD Partai Persatuan Indonesia					03.J/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
11	DPC Partai Persatuan Pembangunan					03.K/LHP/XIX.MAM/03/2021	16-Feb-21	8-Mar-21	17-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
	Kabupaten Mamuju Tengah	28/ST/XIX.MAM/03/2021	3-Mar-21	15-Mar-21	24-Mar-21								
1	DPD Partai Persatuan Indonesia					05.A/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
2	DPD Partai Amanat Nasional					05.B/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
3	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya					05.C/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
4	DPD Partai Keadilan Sejahtera					05.D/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
5	DPD Partai Golongan Karya					05.E/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
6	DPC Partai Demokrat					05.F/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
7	DPC Partai Kebangkitan Bangsa					05.G/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
8	DPC Partai Hati Nurani Rakyat					05.H/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
9	DPD Partai Nasdem					05.I/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
	Kabupaten Pasangkayu	29/ST/XIX.MAM/03/2021	3-Mar-21	15-Mar-21	24-Mar-21								
1	DPC Partai Demokrat					04.C/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya					04.D/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
3	DPD Partai Golongan Karya					04.E/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
4	DPC Partai Hati Nurani Rakyat					04.F/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
5	DPD Partai Nasdem					04.I/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
6	DPD Partai Amanat Nasional					04.A/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
7	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan					04.B/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
8	DPD Partai Persatuan Indonesia					04.J/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
9	DPC Partai Kebangkitan Bangsa					04.H/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
10	DPD Partai Keadilan Sejahtera					04.G/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
11	DPC Partai Persatuan Pembangunan					04.K/LHP/XIX.MAM/03/2021	4-Feb-21	12-Mar-21	5-May-21	26-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
	Kabupaten Mamasa	30/ST/XIX.MAM/03/2021	3-Mar-21	15-Mar-21	24-Mar-21								
1	DPD Partai Golongan Karya					02.H/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya					02.K/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
3	DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia					02.G/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
4	DPD Partai Keadilan Sejahtera					02.D/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1

Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol (Banparpol)

Lampiran 2

No.	Nama Partai Politik	Surat Tugas				Realisasi Pelaporan Pemeriksaan						% Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Jumlah LHP Diterbitkan
		Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nomor LHP	Tanggal Penyerahan LK dari Entitas	Tanggal P2 (Kinerja/DTT)	Tanggal Penyampaian LHP Seharusnya	Tanggal BAST	Tanggal Surat Keluar		
5	DPD Partai Nasdem					02.C/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
6	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan					02.B/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
7	DPD Partai Amanat Nasional					02.L/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
8	DPC Partai Hati Nurani Rakyat					02.I/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
9	DPD Partai Solidaritas Indonesia					02.A/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
10	DPC Partai Persatuan Pembangunan					02.J/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
11	DPC Partai Kebangkitan Bangsa					02.F/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
12	DPD Partai Persatuan Indonesia					02.M/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
13	DPC Partai Demokrat					02.E/LHP/XIX.MAM/03/2021	15-Feb-21	12-Mar-21	16-May-21	30-Mar-21	26-Mar-21	100%	1
	Provinsi Sulawesi Barat	39/ST/XIX.MAM/03/2021	17-Mar-21	22-Mar-21	31-Mar-21								
1	DPW Partai Amanat Nasional					06.A/LHP/XIX.MAM/03/2021	5-Mar-21	18-Mar-21	3-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
2	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan					06.B/LHP/XIX.MAM/03/2021	17-Mar-21	18-Mar-21	15-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
3	DPD Partai Demokrat					06.C/LHP/XIX.MAM/03/2021	17-Mar-21	18-Mar-21	15-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
4	DPD Partai Golongan Karya					06.D/LHP/XIX.MAM/03/2021	17-Mar-21	18-Mar-21	15-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
5	DPW Partai Nasdem					06.E/LHP/XIX.MAM/03/2021	17-Mar-21	18-Mar-21	15-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
6	DPW Partai Persatuan Indonesia					06.F/LHP/XIX.MAM/03/2021	22-Mar-21	18-Mar-21	20-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
7	DPW Partai Persatuan Pembangunan					06.G/LHP/XIX.MAM/03/2021	23-Mar-21	18-Mar-21	21-Jun-21	14-Apr-21	31-Mar-21	100%	1
	Kabupaten Mamuju	40/ST/XIX.MAM/03/2021	19-Mar-21	29-Mar-21	7-Apr-21								
1	DPD Partai Nasdem					07.A/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
2	DPC Partai Demokrat					07.B/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
3	DPC Partai Hati Nurani Rakyat					07.C/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
4	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya					07.D/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
5	DPD Partai Amanat Nasional					07.E/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
6	DPD Partai Golongan Karya					07.F/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
7	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan					07.G/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera					07.H/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
9	DPD Partai Persatuan Indonesia					07.I/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
10	DPC Partai Bulan Bintang					07.J/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
11	DPC Partai Persatuan Pembangunan					07.K/LHP/XIX.MAM/04/2021	1-Mar-21	8-Mar-21	30-May-21	16-Apr-21	6-Apr-21	100%	1
	Provinsi Sulawesi Barat	70/ST/XIX.MAM/04/2021	30-Apr-21	3-May-21	7-May-21								
1	DPD Partai Hati Nurani Rakyat					08.A/LHP/XIX.MAM/05/2021	31-Mar-21	18-Mar-21	29-Jun-21	24-May-21	21-May-21	100%	1
2	DPD Partai Kebangkitan Bangsa					08.B/LHP/XIX.MAM/05/2021	7-Apr-21	18-Mar-21	6-Jul-21	24-May-21	21-May-21	100%	1
3	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya					08.C/LHP/XIX.MAM/05/2021	30-Mar-21	18-Mar-21	28-Jun-21	24-May-21	21-May-21	100%	1
												7500%	75

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	Rp15.807.010.000,00	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90%	82,14%	NA	NA
	Rp6.350.782.000,00	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	NA	NA
	Rp9.456.228.000,00	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,26%	77,98%	78,22%	74,13%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,51%	100,75%	NA	NA
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	NA	NA
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,36%	100%	NA	NA
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,48)	Sangat Memuaskan (4,67)	Sangat Memuaskan (4,76)	Sangat Memuaskan (4,41)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (93,41)	AA (92,47)	A (86,68)	BB (79,77)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,59%	98,59%	98,31%	95,37%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	NA	NA
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,11)	Sangat Memuaskan (4,01)	NA	NA
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,55%	98,57%	100%	98%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	86,69%	92,00%	85,26%	80,17%

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran : 2021

Formulir Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	Rp15.807.010.000,00	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90%	90
	Rp6.350.782.000,00	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,26%	100,34
	Rp9.456.228.000,00	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,51%	100,51
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,36%	100,36
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,48)	89,60
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (93,41)	105
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,59%	102,7
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,11)	105
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,55%	98,55
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	86,69%	99,07

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp15.807.010.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp15.402.757.884,00

Skor Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA

PRISMA | Update

https://prisma.bpk.go.id/Scorecard/Manage/Update

PRISMA PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI & MANAJEMEN KINERJA

SARULOH LOG OUT

2021 DES / TW 4 / SE ... Daftar Satker

Input Data Terbuka

sulawesi barat

- Badan Pemeriksa Keuangan
 - Auditorat Utama Keuangan Negara VI
 - BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2021

Perjanjian Kinerja / Peta Strategi | Detail Scorecard | Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

Expand Refresh Calculate Export Edit Detail & Dokumen

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	Scorecard	Triwulan...				99.49
↳ Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				99.49
↳ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	90.00 %	90
↳ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
↳ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75.00%	75.00%	75.26 %	100.34
↳ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.51 %	100.51
↳ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
↳ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.36 %	100.36
↳ IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5.00	5.00	4.48	89.6
↳ IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	87.00	87.00	93.41	105
↳ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	96.00%	96.00%	98.59 %	102.7
↳ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
↳ IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3.80	3.80	4.11	105
↳ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	98.55 %	98.55
↳ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	87.15%	87.50%	86.69 %	99.07

Skor Indikator Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA

Keluaran / Indikator Kinerja Keluaran	Target PK	Satuan	Realisasi Keluaran TW Ini	Realisasi Keluaran s.d. TW Ini	Target TW Ini	Realisasi TW Ini
1043.EAA - Layanan Perkantoran	0	Layanan	0	0		
004.01.C1.1043.EAA.004 - Layanan Perkantoran						
Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95	Persentase			95	98.88
1043.EAD - Layanan Sarana Internal	0	Unit	0	0		
004.01.C1.1043.EAD.001 - Layanan Sarana Internal						
Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	Paket			1	1
1043.EAE - Layanan Prasarana Internal	0	Unit	0	1		
004.01.C1.1043.EAE.001 - Layanan Prasarana Internal						
Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1	Paket			1	1
1043.FAF - Pemeriksaan Keuangan	0	Laporan	0	150		
004.01.C1.1043.FAF.041 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat						
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.076 - LHP atas Bantuan Keuangan Peral Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat						
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.087 - LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan						

004.01.C1.1043.FAF.002 - LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan						
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	100	Persentase			0	0
004.01.C1.1043.FAF.116 - Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan						
Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.124 - Sumbangan HPS Perwakilan						
Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.132 - Laporan Profil Entitas Perwakilan						
Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.174 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat						
Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.215 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat						
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.256 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat						
Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.273 - Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan						
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100	Persentase			100	100
004.01.C1.1043.FAF.274 - Layanan Manajemen Internal Perwakilan						
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100	Persentase			100	98